

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE DITINJAU  
DARI ASPEK FINANCIAL**

**(STUDI PADA PT. PETROKIMIA GRESIK)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**RACHMAT NOVIANTO**

**NIM. 0810320125**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN  
MALANG  
2012**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 21 Juni 2012

Nama : Rachmat Novianto

NIM : 0810320125

## RINGKASAN

Rachmat Novianto, 2012, **Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Ditinjau Dari Aspek *Financial*** (studi pada PT. Petrokimia Gresik), Dr. Darminto, M.si, Drs. Achmad Husaini, MAB, 89 Hal + xi

Penelitian ini dilakukan atas dasar banyaknya BUMN yang masih belum menerapkan *Good Corporate Governance* secara keseluruhan. Komponen dari penerapan prinsip tersebut antara lain prinsip *Transperency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, *Fairness*. Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan suatu kebutuhan yang nyata bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya, baik kinerja keuangan, administrasi, maupun operasionalnya. Bagaimanakah penerapan prinsip *Good Corporate Governance* ditinjau dari aspek *financial*.

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* ditinjau dari aspek *financial* yang meliputi penerapan prinsip *Transperency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness*, yang masing-masing indikator pelaksanaannya diberi skor bobot sesuai dengan pedoman pelaksanaan praktek *Good Corporate Governance*, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis deskriptif, jika ditinjau dari rumusan masalah dan waktu penelitian. Deskripsi penerapan *Good Corporate Governance* diutamakan pada aspek keuangan yang meliputi analisis rasio-rasio keuangan, antara lain rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio *leverage*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Petrokimia Gresik telah menerapkan secara keseluruhan dari prinsip *Good Corporate Governance*, yang meliputi penerapan prinsip umum tata kelola perusahaan yang baik. Seperti penerapan prinsip *Transperency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness*. Berbagai kendala dan hambatan selalu muncul dalam perjalanan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* PT. Petrokimia Gresik. Kendala tersebut muncul dari beberapa segi, khususnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Seperti pada organ manajemen perusahaan maupun pada aplikasi penerapan prinsip tata kelola perusahaan.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Petrokimia Gresik terus berusaha diperbaiki agar total skor perusahaan pada penerapan tata kelola perusahaan selalu meningkat setiap tahunnya. PT. Petrokimia Gresik agar dapat memperoleh penilaian yang baik dan meningkat setiap tahunnya dalam penerapan *Good Corporate Governance*, manajemen sebaiknya lebih melakukan sosialisasi dan mengkomunikasikan tentang tata kelola perusahaan yang baik pada setiap unit kerja.

## SUMMARY

Rachmat Novianto, 2012, **Analysis Of The Application Of The Principles Of Good Corporate Governance Review Of The Financial Aspects in PT. Petrokimia Gresik**, Dr. Darminto, M.si, Drs. Achmad Husaini, MAB, 89 Hal + xi.

This research was conducted on the basis of many STATE-OWNED ENTERPRISES are still not implementing Good Corporate Governance as a whole. Components of the implementation of those principles, among others, the principle of Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness. The application of Good Corporate Governance is a real necessity for the company to improve its performance, that is financial performance, administration, and operations. How does the implementation of the principles Good Corporate Governance Review of the financial aspects.

The purpose of this research was to describe the implementation of the principles Good Corporate Governance Review of the financial aspects which include Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness, which each indicator weighted scores were given to their implementation in accordance from the implementation of Good Corporate Governance, the company's STATE-OWNED ENTERPRISES

The research conducted includes descriptive type, look from the formulation of the problem and time of the research. Description implementation of Good Corporate Governance should be prioritised for financial aspect which includes analysis financial ratios, such as likuidity ratio, profitability ratio, activity ratio, dan leverage ratio.

The results of this research show that PT Petrokimia Gresik has implemented in its entirety from the principles of Good Corporate Governance, which includes the implementation of general principles of good corporate governance. As the application of the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness. Many constraints and obstacles always emerged in the course of the implementation the principles good corporate in their way. The obstacle came from some ways, particularly the principle of good corporate governance. As in the organ of the company management and implementation of the principles.

The implementation of the principles of Good Corporate Governance on PT Petrokimia Gresik kept trying to be repaired at the company's total score corporate governance practices necessarily increase every year. PT. Petrokimia Gresik to acquire good judgment and increase every year in the implementation of Good Corporate Governance, management should do more socializing and communicating about corporate governance is good on every work unit.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Ditinjau Dari Aspek Financial” (Studi Pada PT Petrokimia Gresik).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Kusdi Raharjo, DEA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Drs. R. Rustam Hidayat, Msi selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Darminto, MSi selaku Ketua dosen pembimbing yang telah berkenaan dan sabar memberikan petunjuk, arahan serta bimbingan penulisan Skripsi ini hingga dapat penulis selesaikan.
5. Bapak Drs. Achmad Husaini, MAB selaku Anggota dosen pembimbing yang telah berkenaan dan sabar memberikan petunjuk, arahan serta bimbingan penulisan Skripsi ini hingga dapat penulis selesaikan.
6. Para Ibu Dosen dan Bapak Dosen FIA UB yang telah berkenaan mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan, selama waktu kuliah
7. Bapak Pimpinan PT Petrokimia Gresik khususnya Bapak Eko beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan bantuan dan

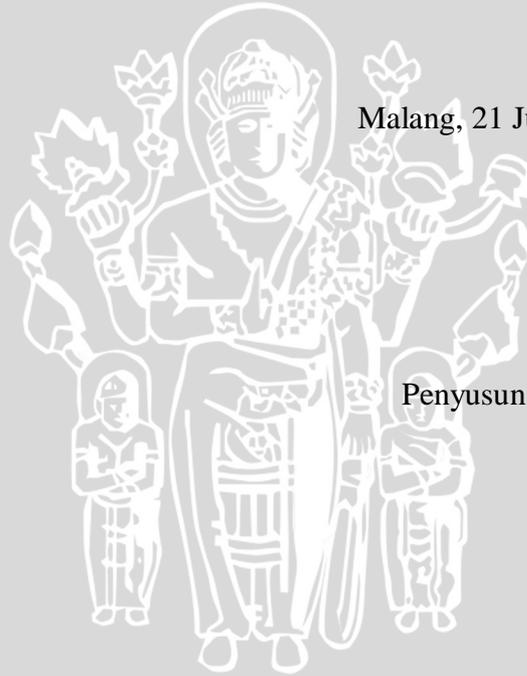
kerjasamanya kepada penulis mengenai data yang diperlukan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

8. Bapak, Ibu, Kakak, Adik serta seluruh keluarga yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, dan do'a.
9. Seluruh teman-teman tercinta yang telah memberikan saran sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan.

Demi kesempurnaan Skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis Skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 21 Juni 2012

Penyusun



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Istilah *corporate governance* muncul pertama kali diperkenalkan oleh suatu Komite yang bernama *Calbury Committee*, yang dibentuk sebagai suatu perwujudan keprihatinan terhadap aktivitas perusahaan di Inggris. Komite ini menghasilkan suatu laporan yang dikenal *Calbury Report* yang mendefinisikan tata kelola perusahaan adalah "Seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka" (Effendi, 2008:35). "Hal ini mengandung pengertian bahwa konsep tata kelola perusahaan tidak dapat terpisahkan dari konsep dan sistem korporasi" (Djanegara, 2008:7). Di negara-negara Asia, konsep ini mulai berkembang pada awal tahun 1990-an, kemudian di Inggris istilah ini muncul lagi pada tahun 1992. Di Australia baru mengenal istilah ini pada tahun 1996 kemudian disusul Indonesia pada tahun 1998. Setelah banyak negara mengenal dan mempraktekkan penerapan *Corporate Governance*, negara-negara maju di kawasan Eropa Barat dan Amerika Utara bergabung untuk membentuk kelompok OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) pada tahun 1999.

*Good Corporate Governance* di Indonesia mulai pada masa krisis tahun 1998. Perekonomian Indonesia terganggu dan menuju titik terendah sejak 35 tahun terakhir. Indonesia termasuk salah satu negara di kawasan Asia Tenggara

yang mengalami dampak paling parah. Sektor kinerja usaha mengalami guncangan yang begitu hebat dan mengakibatkan banyak perusahaan terlikuidasi, bahkan tidak sedikit yang gulung tikar. Ini terjadi karena banyak praktek pelanggaran pada pengelolaan perusahaan di Indonesia. Sebagai contoh, praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan antara pelaku usaha dan pemerintah akan mengakibatkan kolongmerasi yang akan menghancurkan citra dan alih fungsi suatu kebijakan. Selain itu, gagasan *Good Corporate Governance* muncul dari para pelaku bisnis yang kemudian dilaksanakan pada perusahaannya. Beberapa puluh tahun lalu, perusahaan semata-mata hanya mengejar keuntungan dan kesejahteraan karyawannya. Pada akhirnya perusahaan mulai mengembangkan konsep baru yang lebih luas yaitu tetap bertumpu pada keuntungan dan kesejahteraan karyawan, tetapi berkesinambungan dengan tanggung jawab sosial dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kepercayaan investor, praktek bisnis yang sehat, kinerja keuangan yang tinggi, naiknya nilai saham, hasil produk berkualitas dan pelayanan yang maksimal bagi konsumen serta hak-hak pekerja merupakan bagian dari lingkungan perusahaan yang harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan.

Banyak perusahaan melakukan praktek *Good Corporate Governance*, maka pemerintah melalui Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance menerbitkan pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) untuk pelaku usaha di Indonesia, dan mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Djanegara,2008:9).

Diterbitkannya pedoman tersebut agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan saat ini dan kelangsungan perusahaan dimasa yang akan datang. Pengawasan pemerintah lebih mudah dalam praktek *Good Corporate Governance* di tiap-tiap perusahaan. ”Ketentuan tentang tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) tersebut (terutama) ditujukan bagi perusahaan-perusahaan publik, Badan Usaha Milik Negara, dan perusahaan-perusahaan yang menggunakan dana publik atau ikut serta dalam pengelolaan dana publik” (Effendi, 2009:8). Dengan adanya pedoman pelaksanaan praktek *Good Corporate Governance* tersebut, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat lebih menjaga kinerja perusahaan. Pendapatan pemerintah dari sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap terjaga. Kondisi perekonomian negara akan tetap stabil dan tidak mudah terserang krisis seperti sepuluh tahun yang lalu.

Situasi perekonomian Indonesia saat ini masih belum pulih dari krisis moneter yang berkepanjangan beberapa tahun yang lalu. Meskipun terdapat *trend* positif dibandingkan negara-negara lain, tetapi masih banyak kalangan yang sangat sulit untuk kembali pada kondisi perekonomian yang stabil seperti dulu. Banyak perusahaan yang terpaksa dilikuidasi karena kelangsungan usahanya tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini pula yang secara tidak langsung berimbas terhadap kondisi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kinerja perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki banyak faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut yang akan berpengaruh pada perekonomian nasional. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat dan menjaga kestabilan

perekonomian dan sisi lainnya berkewajiban membantu perekonomian dan keuangan negara. Pendapatan negara dari sektor BUMN tetap stabil dan harus meningkat dari tahun ke tahun. Karena laba perusahaan BUMN termasuk penyumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Agar pendapatan tersebut tetap aman dari tahun ketahun, maka pemerintah harus benar-benar menerapkan *Good Corporate Governance* di semua perusahaan BUMN.

Permasalahan saat ini yang timbul dan ramai dibicarakan adalah penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan swasta maupun BUMN. Dalam pelaksanaannya *Good Corporate Governance* di Indonesia belum diklasifikasikan pada analisis jenis BUMN yang telah melakukan penjualan saham di pasar modal atau belum melakukannya. Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan suatu kebutuhan yang nyata bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Seperti halnya perwujudan prinsip transparansi *Good Corporate Governance* memegang peranan penting untuk kinerja perusahaan yang menciptakan efisiensi usaha, peningkatan laba perusahaan, kepercayaan dari pemegang saham, dan posisi perusahaan yang kompetitif. PT. Petrokimia Gresik merupakan salah satu perusahaan yang telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang dibangun melalui partisipasi aktif seluruh jajaran perusahaan. PT. Petrokimia Gresik merupakan pabrik pupuk terbesar dan terlengkap di Asia, maka untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik, telah dilakukan *assessment Good Corporate Governance* oleh Badan Pengawas Keuangan Perusahaan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur. Nilai *assessment Good Corporate Governance* merupakan salah satu

*Key Performance* indikator keberhasilan manajemen. Selain itu, PT. Petrokimia Gresik selalu ikut serta dalam ajang *Annual Report Award* (ARA) sebagai wujud penerapan *Good Corporate Governance*. Ini semua guna mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan tetap menciptakan suatu perusahaan yang memiliki kinerja bagus. Hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk mengangkat judul “ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DITINJAU DARI ASPEK *FINANCIAL* PADA PT. PETROKIMIA GRESIK”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tentang implementasi *Good Corporate Governance* pada perusahaan BUMN di Indonesia, maka pengukuran *Good Corporate Governance* salah satunya dengan mengukur kinerja perusahaan dari aspek *financial*. Agar pembahasan menjadi lebih fokus dan sistematis, maka perumusan masalahnya adalah “Bagaimanakah penerapan prinsip *Good Corporate Governance* ditinjau dari aspek *financial*?”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* ditinjau dari aspek *financial* yang meliputi penerapan prinsip *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness*, yang masing-masing indikator pelaksanaannya diberi skor bobot sesuai dengan pedoman pelaksanaan praktek *Good Corporate Governance*, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

#### D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat atau kontribusi, ditinjau dari aspek akademis maupun aspek praktis, sebagai berikut:

##### 1. Aspek teoritis atau aspek akademis.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran atau masukan dalam pengembangan Ilmu Administrasi Bisnis, khususnya manajemen keuangan dan kajian pengetahuan di bidang bisnis lainnya seperti *Good Corporate Governance*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian yang selanjutnya dan dapat memberikan informasi ilmiah bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

##### 2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini merupakan informasi tentang penerapan *Good Corporate Governance* yang ditinjau dari aspek *financial* perusahaan dan dapat dijadikan pertimbangan atau masukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan dalam menanamkan modalnya. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau masukan yang berguna dan dapat memberikan informasi bagi :

###### 1) Perusahaan yang menjadi objek penelitian

- a. Memberikan masukan kepada perusahaan dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perusahaan yang terkait *Good Corporate Governance*.

- b. Sebagai masukan atau pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dan efisien pada periode yang akan datang. memberikan manfaat berupa pengalaman berkomunikasi dan berinteraksi langsung dalam kegiatan perusahaan yang sebenarnya. dapat juga sebagai bahan perbandingan antara teori yang diperoleh dari kuliah dengan praktek sebenarnya.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan masalah, batasan masalah, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tinjauan pustaka dan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang berhubungan dengan *Good Corporate Governance* dan berbagai permasalahan yang ada, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pemecahan masalah.

#### **BAB III: Metodologi Penelitian**

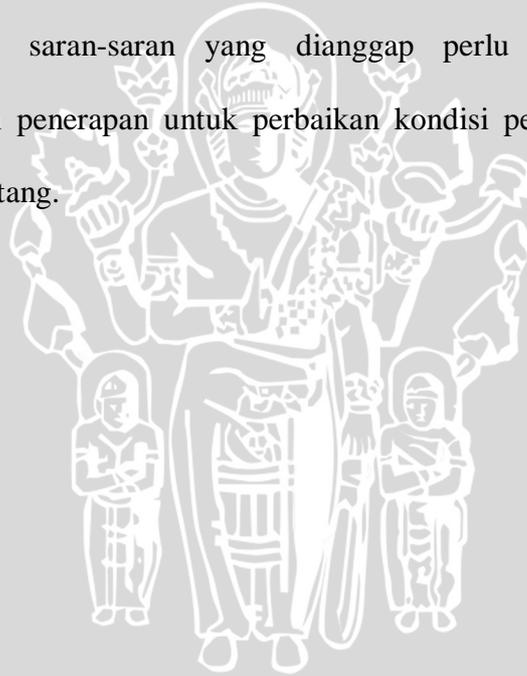
Bab ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, jenis data, lokasi penelitian, sumber data, fokus penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

#### BAB IV: Pembahasan

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian mengenai *Good Corporate Governance* pada PT. Petrokimia Gresik. Pada bab ini akan dijelaskan gambaran umum perusahaan, keadaan yang sebenarnya terjadi serta data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dan dibahas dengan mengacu pada tinjauan pustaka serta metode penelitian.

#### BAB V : Penutup

Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan dikemukakan saran-saran yang dianggap perlu digunakan, serta kemungkinan penerapan untuk perbaikan kondisi perusahaan di masa yang akan datang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sejarah Perkembangan *Good Corporate Governance*

Sebelum mengetahui makna dari *Good Corporate Governance*, maka sebaiknya dimengerti terlebih dahulu arti dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*) itu sendiri. Isu *Corporate Governance* merupakan sebuah isu yang tidak pernah usang. Mc Kinsey & Co. (2002) menyatakan bahwa, “tata kelola perusahaan merupakan perhatian utama bagi investor. Para investor cenderung menghindari perusahaan-perusahaan yang buruk dalam penerapan tata kelola perusahaan” (Djanegara, 2008:7).

Monks dan Minow (2001) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan sebagai berikut: “Istilah '*corporate governance*' mengacu kepada hubungan di antara tiga kelompok dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan” (Djanegara, 2008:8). Konsep tata kelola perusahaan menurut Solomon dan Solomon adalah sebagai berikut. “*Corporate governance is the system of check and balance, both internal and external to companies discharge their accountability to all their stakeholder and act in a socially responsible way in all areas of their business activity*” (Djanegara, 2008:8).

Menurut definisi di atas *corporate governance* adalah sistem *check and balance* antara pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan yang memberikan keyakinan bahwa perusahaan menjalankan akuntabilitasnya kepada semua *stakeholder* dan bertindak dalam kerangka pertanggungjawaban untuk seluruh area aktivitas perusahaan.

Peristiwa *WorldCom* dan *Enron* di Amerika Serikat telah menambah keyakinan tentang betapa pentingnya penerapan *Good Corporate Governance*. Peristiwa tersebut mengakibatkan pemerintah Amerika Serikat dengan perubahan fundamental peraturan perundang-undangan di bidang audit dan pasar modal. Sedangkan di negara-negara lain ditanggapi secara berbeda, antara lain dalam bentuk penyempurnaan pedoman *Good Corporate Governance* di negara tersebut.

Dua dekade terakhir ini, istilah ini muncul kembali dikarenakan krisis ekonomi besar-besaran yang menimpa Asia. Awal dari krisis tersebut pertama kali terjadi pada negara-negara Asia Tenggara, yang selanjutnya devaluasi ini menyebar ke negara-negara lain. Nilai mata uang mengalami penurunan dan nilai tukar mata uang pun melambung tinggi. Situasi tersebut berimbas pada perekonomian Indonesia, bahkan di kawasan Asia Tenggara Indonesia merupakan negara yang paling parah dampaknya.

“Banyak perusahaan yang harus dilikuidasi dan *merger* dengan perusahaan lain” (Djanegara, 2008:15). Akhirnya, semua bermuara pada keterkaitan dengan *good governance*. Jika suatu negara memiliki *good governance* yang baik akan mampu bertahan ketika negara tersebut menghadapi krisis ekonomi.

Suatu negara khususnya negara berkembang, diperlukan sumber daya yang dapat memperkuat perekonomian. Untuk menjalankan fungsi-fungsi perekonomian tersebut diperlukan dana dan kestabilan kekuatan dari para *stakeholder*. Peranan ini sangat penting mengingat keberadaan sumber daya ekonomis yang sangat terbatas dan, oleh karenanya, harus dapat dialokasikan

seoptimal mungkin. Untuk itu, korporasi atau perusahaan merupakan suatu alat yang memiliki peranan sentral dalam perekonomian.

Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 telah mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* yang pertama. Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Berdasarkan pemikiran bahwa suatu sektor ekonomi tertentu cenderung memiliki karakteristik yang sama, maka pada awal tahun 2006 dikeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance*.

Sejak Pedoman *Good Corporate Governance* di keluarkan pada tahun 1999 dan selama proses pembahasan pedoman *Good Corporate Governance*, telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar, baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Walaupun peringkat penerapan *Good Corporate Governance* di dalam negeri masih sangat rendah, namun semangat menerapkan *Good Corporate Governance* di kalangan dunia usaha dirasakan ada peningkatan.

Di Indonesia beberapa perusahaan membentuk kelompok kerja *Corporate Governance* dan Etika Korporasi. Meski telah dibentuk kelompok tersebut, penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Djanegara (2008:17) penerapan GCG yang belum mencapai sasaran ini disebabkan sistem GCG yang diterapkan dalam suatu negara haruslah memperhatikan aspek-aspek lain, seperti budaya, struktur ekonomi dan regulasi secara menyeluruh serta struktur sosial dan perkembangan ekonomi suatu negara. Sistem *Governance* yang diterapkan di Indonesia menurut Syakhroza pun belum terkonsep secara jelas dan tidak memiliki kekuatan seperti yang diterapkan di Amerika dan Eropa kontinental. Hal ini dapat dilihat dari UU perseroan tahun 1995 yang menyatakan bahwa anggota Dewan

Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dengan demikian, maka secara jelas dapat dikatakan bahwa Dewan Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab langsung kepada RUPS. Sebagaimana diketahui bahwa pemegang saham BUMN adalah pemerintah dengan perpanjangan tangan melalui institusinya antara lain Bank Indonesia, Departemen Keuangan, dan Departemen Teknis yang terkait. Hal inilah yang menjadikan sistem GCG tidak dapat diimplementasikan secara efektif karena RUPS yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah dapat melakukan intervensi kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN.

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya *Good Corporate Governance* di Indonesia masih belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena RUPS yang sebagai kepanjangan tangan pemerintah dapat diintervensi oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN tersebut.

## **B. Pengertian *Good Corporate Governance***

Tata kelola perusahaan merupakan istilah yang muncul dari interaksi di antara pihak manajemen, pemegang saham, dan Dewan Direksi serta pihak terkait lainnya, akibat adanya ketidak konsistennya antara “apa” dan “apa yang seharusnya”, sehingga isu tata kelola perusahaan muncul (Zarkasyi, 2008:35). Istilah *corporate governance* muncul pertama kali diperkenalkan oleh suatu Komite yang bernama *Calbury Committee*, yang dibentuk sebagai suatu perwujudan keprihatinan terhadap aktivitas perusahaan-perusahaan di Inggris. *Calbury Committee* dalam laporannya yang dikenal sebagai *Calbury Report* mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai berikut . “Seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka” (Effendi, 2008:35). “Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)

merupakan struktur yang oleh *stakeholder*, pemegang saham, Komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja" (Effendi, 2008:36).

Di luar negeri penerapan *Good Corporate Governance* dikembangkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada bulan April 1998 dan telah merevisi *Principles of Corporate Governance* pada tahun 2004. Dalam pedoman baru OECD, tambahan yang penting adalah penegasan tentang perlunya penciptaan kondisi oleh pemerintah dan masyarakat untuk dapat dilaksanakannya *Good Corporate Governance* secara efektif.

Pada tahun 2002, Pemerintah melalui Menteri BUMN mengeluarkan Keputusan Menteri No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 pasal 1 tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika (Effendi, 2009:2).

Berdasarkan pengertian tersebut pada dasarnya, *Good Corporate Governance* secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder* dan *shareholder*). Hal ini disebabkan karena *Good Corporate Governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang Bersih, Transparan, dan Profesional (BTP). Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten di perusahaan akan menarik minat para investor, baik domestik maupun investor asing. Minat investor menanamkan modalnya semakin meningkat sangat penting

bagi perusahaan yang akan mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru maupun proyek ekspansi hasil produksinya.

### **C. Pedoman Bagi Pengelolaan Perusahaan yang Baik**

Untuk mendorong pasar bisnis yang efisien, transparan, dan konsisten maka diperlukan *Good Corporate Governance* sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Peraturan Undang-Undang yang berlaku menyaratkan bahwa diperlukannya pedoman pengelolaan perusahaan yang baik. Variabel-variabel yang terkait pada pedoman bagi pengelolaan perusahaan yang baik yaitu penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Dua komponen tersebut yang menjadi kunci utama keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* di suatu perusahaan. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang harus diterapkan meliputi:

#### **1. Prinsip *Transparency***

Prinsip transparansi dalam penerapannya pada suatu perusahaan, diperlukan suatu alat ukur penilaian. Indikator yang dinilai menyangkut proses administrasi penyediaan informasi secara tepat waktu, khususnya laporan keuangan yang bersifat krusial dan fundamental perusahaan, baik dalam berupa laporan perhitungan tahunan, rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), maupun yang secara periodik. Menurut Zarkasyi (2008:63) terdapat metode penilaian yang merupakan penilaian aspek administrasi perusahaan yang berkaitan dengan aspek keuangan, yaitu :

### (a) Transparansi Dalam Penyampaian Laporan Tahunan

Transparansi dalam penyampaian laporan keuangan setiap tahun merupakan jangka waktu pelaporan secara keseluruhan per 31 Desember pada tahun bersangkutan. Standar waktu penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau BAPPEPAM (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) harus sudah diterima oleh pemegang saham untuk persero paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan. Skor penilaian tentang transparansi dalam penyampaian laporan keuangan tahunan sebagai berikut :

**Tabel 1 Skor Penilaian Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan**

| Jangka waktu laporan audit diterima  | Skor |
|--|------|
| Sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup | 5    |
| Sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup  | 2    |
| Lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup     | 0    |

*Sumber: Zarkasyi (2008 : 63)*

### (b) Transparansi Dalam Penyampaian Rancangan RKAP

Transparansi dalam penyampaian rancangan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) merupakan perencanaan program kerja dalam melakukan operasional yang meliputi produksi untuk jenis manufaktur, penjualan produk atau jasa maupun aktivitas lainnya. Perusahaan harus penyampaian rancangan RKAP, sehingga perlu dibuat suatu rancangan mengenai *budgeting* pada tahun bersangkutan. Dengan landasan Peraturan Pemerintah No.12 dan No.13 bahwa RUPS untuk persero dalam pengesahan

rancangan RKAP tahunan sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan. Skor penilaian tentang transparansi dalam penyampaian rancangan RKAP tahunan sebagai berikut :

**Tabel 2 Skor Penilaian Penyampaian Rancangan RKAP**

| Jangka waktu surat diterima s.d. memasuki tahun anggaran yang bersangkutan | Skor |
|--|------|
| 2 bulan atau lebih cepat   | 3    |
| Kurang dari 2 bulan  | 0    |

*Sumber: Zarkasyi (2008 :64)*

**(c) Transparansi Dalam Penyampaian Laporan Periodik**

Transparansi dalam penyampaian laporan periodik yaitu laporan yang dibuat secara berkala/periodik dalam jangka waktu tertentu dalam tahun buku, laporan periodik dapat dibuat per tiga bulan maupun semesteran. Laporan periodik triwulan maupun semesteran sudah harus diterima oleh Komisaris / Dewan pengawas pemegang saham untuk persero paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya periode laporan. Skor penilaian tentang transparansi dalam penyampaian laporan periodik sebagai berikut :

**Tabel 3 Skor Penilaian penyampaian Laporan Periodik**

| Jumlah keterlambatan dalam 1 tahun    | Skor |
|---------------------------------------|------|
| Lebih kecil atau sama dengan nol hari | 3    |
| $0 < x < 31$                          | 2    |
| $30 < x < 60$ hari                    | 1    |
| $< 60$ hari                           | 0    |

*Sumber: Zarkasyi (2008 : 65)*

**2. Prinsip Accountability**

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan

sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan sebuah perusahaan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Braiotta (2004:4) tentang akuntabilitas korporasi, yang menyatakan bahwa “Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memajukan kepentingan pemegang saham untuk bertindak sebagai wakil mereka dalam penetapan kebijakan perusahaan. Karenanya, para Komisaris memiliki tanggung jawab *fiduciary* terhadap para pemegang saham. Mereka berkewajiban memberi tahu pemegang saham (Djanegara, 2008:8).

Berdasarkan pendapat tersebut pada dasarnya, Dewan Komisaris menjalankan prinsip akuntabilitas secara benar, maka perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Kemudian perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

### 3. Prinsip *Responsibility*

*Corporate Social Responsibility* merupakan wujud dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada lingkungan sekitarnya, dengan cara memberikan perhatian yang lebih pada masyarakat sekitar melalui Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Penilaian terhadap prinsip akuntabilitas

pada perusahaan dapat diwakili melalui PUKK yang merupakan bagian dari aspek administrasi dan berkaitan dengan aspek keuangan dengan dua indikator yaitu efektivitas penyaluran dana dan tingkat kolektabilitas penyaluran pinjaman. Bobot penilaian tentang *responsibility* dalam Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sebagai berikut :

**Tabel 4 Bobot Penilaian Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi**

| No | Indikator Pembinaan                          | Bobot |           |
|----|--|-------|-----------|
|    |  | Infra | Non Infra |
| 1  | Efektifitas Penyaluran                       | 3     | 3         |
| 2  | Tingkat Kolektabilitas Pengembalian pinjaman | 3     | 3         |
|    | <b>Total Bobot</b>                           | 6     | 6         |

Sumber: Zarkasyi (2008 : 66)

Metode penilaian masing-masing indikator dilihat dari efektifitas penyaluran dana pada masyarakat sekitar melalui pemberian kesempatan untuk membuka usaha dengan skala kecil maupun koperasi. Dalam menghitung keefektivitasan penyaluran dana pada masyarakat sekitar, secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas Penyaluran} = \frac{\text{Jumlah Dana yang Disalurkan}}{\text{Jumlah Dana yang Tersedia}} \times 100\%$$

Sumber: Zarkasyi (2008:66)

Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dinilai dengan memasukkan pada tabel skor tingkat penyerapan dana PUKK sebagai berikut :

**Tabel 5 Penilaian Tingkat Penyerapan Dana PUKK**

| Penyerapan (%) | > 90 | 85 s.d. 90 | 80 s.d. 85 | < 80 |
|----------------|------|------------|------------|------|
| Skor           | 3    | 2          | 1          | 0    |

Sumber: Zarkasyi (2008 : 66)

Setelah dana disalurkan, perusahaan menghitung pengembalian kolektabilitas penyaluran pinjaman. Dalam menghitung tingkat kolektabilitas penyaluran pinjaman, diperlukan data rata-rata tertimbang kolektabilitas penyaluran dana yang disalurkan. Dalam menghitung penyerapan dana PUKK secara matematis, menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rata – rata tertimbang kolektabilitas perusahaan}}{\text{Jumlah pinjaman yang disalurkan}} \times 100\%$$

Sumber: Zarkasyi (2008:67 )

Hasil perhitungan penyerapan dana tersebut, selanjutnya dinilai dengan memasukkan ke dalam tabel skor tingkat pengembalian dana PUKK sebagai berikut :

**Tabel 6 Penilaian Tingkat Pengembalian Dana PUKK**

| Tingkat pengembalian (%) | >70 | 40-70 | 10-40 | <10 |
|--------------------------|-----|-------|-------|-----|
| Skor                     | 3   | 2     | 1     | 0   |

Sumber: Zarkasyi (2008 : 67)

#### 4. Prinsip *Independency*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, dan pengaruh atau tekanan dari luar, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Dengan dilaksanakannya fungsi dan tugas sesuai perundang-undangan, organ perusahaan tidak saling melempar tanggung jawab, sehingga dapat terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

## 5. Prinsip *Fairness*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas asas kesetaraan dan kewajaran.

Perusahaan harus memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan. Serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam kedudukan masing-masing. Dan perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan (Zarkasyi, 2008:41).

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada semua pemangku kepentingan, sehingga prinsip *fairness*-pun dapat berjalan dengan baik. Indikator Laporan Perhitungan Tahunan, Rancangan RKAP, Laporan Periodik, serta Kinerja PUKK dapat dijumlahkan sesuai dengan bobot masing-masing aspek.

**Tabel 7 Indikator dan Bobot Aspek Administrasi**

| No | Indikator Aspek Administrasi | Bobot |           |
|----|------------------------------|-------|-----------|
|    |                              | Infra | Non Infra |
| 1  | Laporan perhitungan tahunan  | 3     | 3         |
| 2  | Rancangan RKAP               | 3     | 3         |
| 3  | Laporan Periodik             | 3     | 3         |
| 4  | Kinerja PUKK                 | 6     | 6         |

Sumber: Zarkasyi (2008 : 63)

### D. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Pelaksanaan Pedoman Perusahaan

Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, ada beberapa pihak yang terkait dalam organ perusahaan agar pedoman perusahaan benar-benar

dilaksanakan. Terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, serta pemegang saham dan pemangku kepentingan.

### **1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan tempat para pemegang saham untuk mengambil suatu keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan perusahaan untuk tetap melaksanakan usahanya dalam waktu jangka panjang dan tetap memperhatikan undang-undang yang berlaku. Dalam pelaksanaan RUPS, semua pihak tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, maupun wewenang dari Dewan Komisaris maupun Direksi. Bahkan termasuk untuk penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Saat pengambilan keputusan dalam RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan tetap memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. RUPS merupakan tanggung jawab Direksi, sehingga Direksi harus mempersiapkan dan menyelenggarakan RUPS dengan baik dan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Pada saat penyelenggaraan RUPS apabila Direksi berhalangan, maka pelaksanaan diserahkan pada Dewan Komisaris atau pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan yang berlaku.

## 2. Dewan Komisaris

Kepengurusan dari sebuah perusahaan perseroan terbatas di Indonesia, menganut sistem dua badan (*two board system*) yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki tugas, tanggung jawab, serta fungsi masing-masing. Direksi berfungsi untuk mengurus perusahaan, sementara Dewan Komisaris berfungsi untuk pengawasan internal perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab memelihara kesinambungan perusahaan dalam jangka panjang, keduanya harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan serta masukan pada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melakukan Good Corporate Governance secara benar. Akan tetapi, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan.

Dewan Komisaris memiliki Komisaris utama sebagai koordinator dari Dewan Komisaris, tetapi kedudukannya setara dengan Dewan Komisaris. Tugas dari Komisaris utama yaitu sebagai *primus inter pares* atau disebut juga mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip berikut :

1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberi nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara (Zarkasyi, 2008:96).

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki sifat dapat mengambil keputusan secara independen, berintegritas tinggi, dan profesional sesuai bidangnya. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, membentuk beberapa Komite, yang memiliki tugas membantu pekerjaan Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan kinerja perusahaan. Komite yang dibentuk harus memberikan laporan pada Dewan Komisaris yang berupa usulan-usulan. Usulan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai bahan acuan pengambilan keputusan. Sekurang-kurangnya Dewan Komisaris harus membentuk Komite Audit, sedangkan Komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Sebagian besar perusahaan di Indonesia membentuk tiga Komite tambahan selain Komite Audit, yaitu Komite Nominasi dan Remunerisasi, Komite Kebijakan Risiko, dan Komite Kebijakan *Corporate Governance*.

#### **(a) Komite Audit**

Komite Audit dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, struktur pengendalian internal telah dilaksanakan secara baik, dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai standar.

Di perusahaan BUMN, Komite Audit berperan lebih aktif dari pada auditor internal. Ini dapat terjadi apabila auditor internal BUMN tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Komite Audit juga dapat melakukan sinergi dengan auditor internal, seperti melakukan audit bersama (*joint audit*). Tetapi hanya untuk aspek-aspek strategis yang memerlukan pendalaman khusus (Effendi, 2009:32).

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya Komite Audit berperan lebih aktif dari pada auditor internal, dan juga dapat melakukan sinergi dengan auditor internal, seperti melakukan audit bersama-sama.

**(b) Komite Nominasi dan Remunerisasi**

Komite nominasi dan remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Serta membantu Dewan Komisaris dalam menentukan jumlah kompensasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Tanggung jawab Komite nominasi dan remunerasi mencakup pengkajian kompetensi calon anggota Direksi dan Komisaris untuk posisi yang dimaksud, evaluasi kinerja Komisaris dan Direksi, penyampaian rekomendasi nama-nama calon Direksi dan Komisaris, serta penyusunan kebijakan penggajian maupun insentif bagi anggota Direksi dan Komisaris dengan cara memastikan jumlah dan komposisinya wajar sesuai dengan kinerjanya.

Keberadaan Komite nominasi dan remunerasi serta tata kerjanya dilaporkan dalam RUPS (Zarkasyi, 2008:99). Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya Komite nominasi dan remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta dalam menentukan jumlah kompensasinya secara wajar sesuai dengan kinerjanya.

### (c) Komite Kebijakan Risiko

Komite ini bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang akan dan dapat diambil oleh perusahaan.

Pengelolaan risiko di perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan dimulai dari identifikasi risiko potensial (*potential risk*), penilaian risiko (*risk assessment*), evaluasi dampak risiko terhadap perusahaan termasuk risiko keuangan (*financial impact*), pengendalian risiko, sampai transfer dan pendanaan risiko (Effendi, 2009:22).

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya komite kebijakan risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko dimulai dari identifikasi risiko potensial, penilaian risiko, evaluasi dampak risiko terhadap perusahaan.

### (d) Komite Kebijakan *Corporate Governance*

Komite Kebijakan *Corporate Governance* memiliki tugas utama yaitu membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan *Good Corporate Governance* secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta menilai konsistensi penerapannya. Termasuk yang berhubungan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan.

## 3. Direksi

Direksi sebagai salah satu organ perusahaan bertugas dan bertanggung-jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Setiap anggota Dewan Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya masing-masing. Direksi dapat mengambil keputusan sesuai wewenangnya, namun pada saat pelaksanaan tugas oleh

masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama, karena kedudukannya setara, termasuk Direktur utama. Tugas direktur utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif (Zarkasyi, 2008:101).

Agar tugas Direksi dapat berjalan efektif, maka perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut (Zarkasyi, 2008:101) :

1. Komposisi harus sedemikian rupa sehingga pada saat pengambilan keputusan dapat secara tepat dan independen.
2. Direksi harus profesional, yaitu memiliki kemampuan dan integritas tinggi.
3. Direksi bertanggungjawab atas pengelolaan perusahaan dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya tugas direksi harus memenuhi prinsip profesional dan bertanggungjawab atas perusahaan yang dipimpinnya, sehingga dapat mempertanggungjawabkan pada saat RUPS.

#### **4. Pemegang Saham**

Pemegang saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.

Agar pemegang saham dapat memperoleh hak dan kewajibannya, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Pemegang saham harus memperhatikan kelangsungan perusahaan, bukan hanya untuk mementingkan hak dan tanggung jawabnya saja.
2. Perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham sesuai prinsip kewajaran dan kesetaraan (Zarkasyi, 2008:104).

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya pemegang saham harus memperhatikan kelangsungan perusahaan sebaliknya perusahaan juga harus memenuhi hak dan tanggung jawab perusahaan. Pemegang saham memiliki

hak untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan akurat mengenai keuangan perusahaan atau informasi yang lain. Agar pada saat RUPS pemegang saham dapat meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham memiliki hak memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan yang berupa deviden ataupun keuntungan lainnya yang sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.

#### 5. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan disini bukan hanya pemegang saham, melainkan mereka yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional, yaitu: karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha perusahaan.

Agar hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan berjalan dengan baik, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perusahaan menjamin tidak terjadinya deskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan *gender* serta terciptanya perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong perkembangan karyawan sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman, dan keterampilan masing-masing.
2. Perusahaan dan mitra bisnis harus bekerja sama untuk kepentingan kedua belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan.
3. Perusahaan harus memperhatikan kepentingan umum, terutama masyarakat sekitar perusahaan, serta penggunaan produk dan jasa perusahaan (Zarkasyi, 2008:107).

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya harus terbina hubungan yang baik antara pemangku kepentingan dan perusahaan. Kedua belah pihak harus mengutamakan kepentingan bersama dan harus saling menguntungkan.

## E. Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Manfaat yang diperoleh perusahaan yang secara benar melaksanakan semua prinsip *Good Corporate Governance* secara berkesinambungan, yaitu :

1. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
2. Melindungi Direksi dan Komisaris dari tuntutan hukum.
3. Dapat memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja perekonomian perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholders* terhadap perusahaan.

## F. Kinerja Perusahaan

### 1. Pengertian Kinerja

”Kinerja merupakan sesuatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu usaha” (Zarkasyi, 2008:48). Pendapat lainnya menurut Hawkins, ”Kinerja (*performance*) is: (1) *the proses or manner of performing*, (2) *a notable action or achievement*, (3) *the performing of a play or other entertainment*” (Zarkasyi, 2008:48). Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya, kinerja adalah hasil kerja yang dicapai dari suatu usaha atau suatu prestasi yang penting yaitu sesuatu yang dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu. Tingkat kinerja suatu perusahaan diketahui dengan cara melakukan serangkaian tindakan evaluasi yang intinya adalah penilaian atas hasil usaha yang dilakukan dalam periode tertentu. Hasil usaha tersebut, dapat berupa jasa atau barang yang dapat menjadi atribut atas keberhasilan kerja suatu perusahaan.

Keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 sampai saat ini tetap sebagai acuan penilaian tingkat kinerja dan kesehatan BUMN, tujuannya adalah untuk mengadakan penilaian dalam suatu jangka waktu tertentu. Sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN tersebut berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan atau jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan UU sendiri. BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur dan non infrastruktur. BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

Tingkat kesehatan dari sebuah perusahaan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Penilaian tingkat kesehatan BUMN hanya ditetapkan apabila hasil dari pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi “Wajar Tanpa Pengecualian” atau “Wajar dengan Pengecualian dari Akuntan Publik atau BPKP”.

Menurut Zarkasyi (2008 : 50), penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi :

- a. SEHAT, yang terdiri dari :

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| AAA apabila total tingkat kesehatan | > dari 95 |
| AA apabila total tingkat kesehatan  | 80 - 95   |
| A apabila total tingkat kesehatan   | 65 – 80   |
- b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari :

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| BBB apabila total tingkat kesehatan | 50 - 65 |
| BB apabila total tingkat kesehatan  | 40 - 50 |
| B apabila total tingkat kesehatan   | 30 – 40 |

- c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| CCC apabila total tingkat kesehatan | 20 - 30   |
| CC apabila total tingkat kesehatan  | 10 - 20   |
| C apabila total tingkat kesehatan   | < dari 10 |

Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi tiga yaitu sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

## 2. Aspek Keuangan

Aspek keuangan perusahaan BUMN penilaiannya dibedakan menjadi dua kelompok kegiatan yaitu Infrastruktur memiliki bobot sebesar 50 % dan Non Infrastruktur sebesar 70 %. Sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN tahun 2002, perusahaan BUMN infrastruktur yaitu perusahaan yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi :

- Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
- Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api.
- Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara.
- Bendungan dan irigrasi.

Perusahaan BUMN Non Infrastruktur yaitu perusahaan yang bidang usahanya diluar bidang usaha perusahaan BUMN Infrastruktur. Perusahaan BUMN Infrastruktur maupun Non Infrastruktur dengan indikator yang sama, memiliki bobot indikator berbeda-beda. Indikator dan bobotnya masing-masing, secara rinci disajikan dalam Tabel 8 sebagai berikut :

**Tabel 8 Indikator dan Bobot Aspek Keuangan**

| No                 | Indikator Aspek Keuangan                | Bobot |           |
|--------------------|---|-------|-----------|
|                    |   | Infra | Non Infra |
| 1                  | Imbalan pada pemegang saham (ROE)       | 15    | 20        |
| 2                  | Imbalan Investasi (ROI)                 | 10    | 15        |
| 3                  | Rasio Kas                               | 3     | 5         |
| 4                  | Rasio Lancar                            | 4     | 5         |
| 5                  | Collection Periods                      | 4     | 5         |
| 6                  | Perputaran persediaan                   | 4     | 5         |
| 7                  | Perputaran total asset                  | 4     | 5         |
| 8                  | Rasio modal sendiri terhadap total aset | 6     | 10        |
| <b>Total Bobot</b> |   | 50    | 70        |

Sumber: Zarkasyi (2008 : 51)

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui indikator aspek keuangan yang dinilai dan bobot masing-masing kelompok yang dinilai yaitu Infrastruktur maupun Non Infrastruktur. Indikator aspek keuangan menjadi dasar penilaian tingkat kesehatan perusahaan BUMN dan penilaian aspek keuangan meliputi :

**(a) Return On Equity (ROE)**

”Return On Equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (*income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan” (Syamsuddin, 2009:64). Pengukuran tersebut pada intinya untuk mengukur tingkat penghasilan bersih yang diperoleh dari total aktiva perusahaan. Dalam menghitung *Return on Equity* secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Sumber: Zarkasyi (2008:52)



”Laba setelah pajak yang dimaksud disini adalah laba setelah pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari aktiva tetap, aktiva non produkti, aktiva lain-lain,dan saham penyertaan langsung. Sedangkan yang dimaksud modal sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva tetap dalam pelaksanaan dan laba tahun berjalan (Zarkasyi, 2008:52).

Hasil perhitungan ROE kemudian disesuaikan dengan indikator skor penilaian tingkat kesehatan BUMN yang disajikan dalam Tabel 9 sebagai berikut :

**Tabel 9 Daftar Skor Penilaian ROE**

| ROE (%)         | Skor  |           |
|-----------------|-------|-----------|
|                 | Infra | Non Infra |
| 15 < ROE        | 15    | 20        |
| 13 < ROE ≤ 15   | 13,5  | 18        |
| 11 < ROE ≤ 13   | 12    | 16        |
| 9 < ROE ≤ 11    | 10,5  | 14        |
| 7,9 < ROE ≤ 9   | 9     | 12        |
| 6,6 < ROE ≤ 7,9 | 7,5   | 10        |
| 5,3 < ROE ≤ 6,6 | 6     | 8,5       |
| 4 < ROE ≤ 5,3   | 5     | 7         |
| 2,5 < ROE ≤ 4   | 4     | 5,5       |
| 1 < ROE ≤ 2,5   | 3     | 4         |
| 0 < ROE ≤ 1     | 1,5   | 2         |
| ROE < 0         | 1     | 0         |

Sumber: Zarkasyi (2008 : 52)

**(b) Return On Investment (ROI)**

”Return On Investment (ROI) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan” (Syamsuddin, 2009:63). ROI merupakan perbandingan EBIT ditambah penghapusan dibagi *Capital employed*. Semakin tinggi tingkat rasio ini, maka semakin baik pula keadaan suatu perusahaan. Dalam menghitung

ROI menurut Zarkasyi, secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ROI = \frac{EBIT + Penyusutan}{Capital\ Employed} \times 100\%$$

Sumber: Zarkasyi (2008:53)

EBIT (*Earning Before Interest and Tax*) adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba hasil penjualan dari aktiva tetap, aktiva lain-lain, aktiva non produktif, saham penyertaan langsung. Kemudian penyusutan adalah depresiasi, amortisasi, dan depleksi. Sedangkan *Capital employed* adalah posisi pada akhir tahun buku total aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan (Zarkasyi, 2008:53).

Hasil perhitungan ROI kemudian disesuaikan dengan skor penilaian tingkat kesehatan BUMN kelompok perusahaan infrastruktur maupun non infrastruktur yang secara rinci disajikan dalam Tabel 10 sebagai berikut :

**Tabel 10 Daftar Skor Penilaian ROI**

| ROI (%)         | Skor  |           |
|-----------------|-------|-----------|
|                 | Infra | Non Infra |
| 18 < ROI        | 10    | 15        |
| 15 < ROI ≤ 18   | 9     | 13,5      |
| 13 < ROI ≤ 15   | 8     | 12        |
| 12 < ROI ≤ 13   | 7     | 10,5      |
| 10,5 < ROI ≤ 12 | 6     | 9         |
| 9 < ROI ≤ 10,5  | 5     | 7,5       |
| 7 < ROI ≤ 9     | 4     | 6         |
| 5 < ROI ≤ 7     | 3,5   | 5         |
| 3 < ROI ≤ 5     | 3     | 4         |
| 1 < ROI ≤ 3     | 2,5   | 3         |
| 0 < ROI ≤ 1     | 2     | 2         |
| ROI < 0         | 0     | 1         |

Sumber: Zarkasyi (2008 : 53)

**(c) Cash Ratio**

“Cash ratio merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai apakah rasio suatu perusahaan tersebut baik, terlalu likuid, atau bahkan



kurang likuid. Rasio ini lebih mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang lancarnya lebih tepat waktu” (Alexandri, 2009:196). Dalam menghitung *Cash Ratio* secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat berharga jangka pendek}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Sumber: Zarkasyi (2008:54)

“Kas, bank, dan surat berharga jangka pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku. Sedangkan hutang lancar adalah posisi seluruh kewajiban lancar pada akhir tahun buku” (Zarkasyi, 2008:54).

Hasil perhitungan *Cash Ratio* tersebut kemudian disesuaikan dengan indikator skor penilaian tingkat kesehatan BUMN kelompok perusahaan infrastruktur maupun non infrastruktur yang secara rinci disajikan dalam Tabel 11 sebagai berikut :

**Tabel 11 Daftar Skor Penilaian Cash Ratio**

| <i>Cash Ratio</i> = x (%) | Skor  |           |
|---------------------------|-------|-----------|
|                           | Infra | Non Infra |
| $x \geq 35$               | 3     | 5         |
| $25 \leq x < 35$          | 2,5   | 4         |
| $15 \leq x < 25$          | 2     | 3         |
| $10 \leq x < 15$          | 1,5   | 2         |
| $5 \leq x < 10$           | 1     | 1         |
| $0 \leq x < 5$            | 0     | 0         |

Sumber: Zarkasyi (2008 : 54)

**(d) Current Ratio**

”Rasio lancar merupakan alat ukur likuiditas yang diperoleh dengan membagi aktiva lancar dengan utang lancar” (Sundjaja,

2003:134). *Current Ratio* mencerminkan kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang jangka pendek yang telah jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar.

”Rasio ini tidak dapat mengukur nilai perusahaan tersebut dikatakan baik ataupun jelek, karena tidak ada pedoman umum yang dapat menilai *current ratio*. Karena perlu informasi yang sangat rinci atas aliran kas masuk dan persediaan, piutang dangang dan perlu juga diperhitungkan aliran kas keluar untuk perusahaan sehari-harinya. Hal yang paling penting dalam rasio ini adalah kemampuan perusahaan melunasi hutang lancarnya tepat waktu tanpa harus mengeluarkan kas yang besar. Karena kas yang terlalu besar berarti banyak kas yang menganggur dan apabila kas yang terlalu sedikit mengakibatkan perusahaan sulit malunasi hutang lancar dan operasionalnya (Alexandri, 2009:195).

Dalam menghitung *Current Ratio* secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Sumber: Zarkasyi (2008:55)

Hasil perhitungan *Current Ratio* tersebut kemudian disesuaikan dengan indikator skor penilaian tingkat kesehatan BUMN kelompok perusahaan infrastruktur maupun non infrastruktur yang secara rinci disajikan dalam Tabel 12 sebagai berikut :

**Tabel 12 Daftar Skor Penilaian Current Ratio**

| <i>Current Ratio</i> = x (%) | Skor  |           |
|------------------------------|-------|-----------|
|                              | Infra | Non Infra |
| 125 ≤ x                      | 3     | 5         |
| 110 ≤ x < 125                | 2,5   | 4         |
| 100 ≤ x < 110                | 2     | 3         |
| 95 ≤ x < 100                 | 1,5   | 2         |
| 90 ≤ x < 95                  | 1     | 1         |
| x < 90                       | 0     | 0         |

Sumber: Zarkasyi (2008 : 55)

(e) *Collection Periods*

*Collection periods* adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menagih piutang. Ini bermanfaat untuk menilai kebijakan pinjaman dan penagihan. Dalam menghitung *Collection periods* secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Collection\ Periods = \frac{Total\ Piutang\ Usaha}{Total\ Pendapatan\ Usaha} \times 365\ hari$$

Sumber: Zarkasyi (2008:55)

”Total piutang usaha adalah posisi piutang usaha setelah dikurangi cadangan penyisihan piutang pada akhir tahun buku. Sedangkan total pendapatan usaha adalah jumlah pendapatan usaha selama tahun buku” (Zarkasyi, 2008:55). Hasil perhitungan *Collection Periods* tersebut kemudian disesuaikan dengan indikator skor penilaian tingkat kesehatan BUMN yang disajikan dalam Tabel 13 sebagai berikut :

**Tabel 13 Daftar Skor Penilaian *Collection Periods***

| CP = x<br>(hari)   | Perbaikan = x<br>(hari) | Skor  |           |
|--------------------|-------------------------|-------|-----------|
|                    |                         | Infra | Non Infra |
| $x \leq 60$        | $x > 35$                | 4     | 5         |
| $60 < x \leq 90$   | $30 < x \leq 35$        | 3,5   | 4,5       |
| $90 < x \leq 120$  | $25 < x \leq 30$        | 3     | 4         |
| $120 < x \leq 150$ | $20 < x \leq 25$        | 2,5   | 3,5       |
| $150 < x \leq 180$ | $15 < x \leq 20$        | 2     | 3         |
| $180 < x \leq 210$ | $10 < x \leq 15$        | 1,6   | 2,4       |
| $210 < x \leq 240$ | $6 < x \leq 10$         | 1,2   | 1,8       |
| $240 < x \leq 270$ | $3 < x \leq 6$          | 0,8   | 1,2       |
| $270 < x \leq 300$ | $1 < x \leq 3$          | 0,4   | 0,6       |
| $300 < x$          | $0 < x \leq 1$          | 0     | 0         |

Sumber: Zarkasyi (2008 : 55)

**(f) Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)**

“Inventory turnover bertujuan untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam persediaan berputar dalam setahun” (Syamsuddin, 2009:68).

Total persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan suku cadang. Sedangkan total pendapatan usaha adalah total pendapatan usaha dalam tahun buku yang bersangkutan (Zarkasyi, 2008:56).

Dalam menghitung Perputaran Persediaan secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

*Sumber: Zarkasyi (2008:57)*

Hasil perhitungan Perputaran Persediaan tersebut kemudian disesuaikan dengan indikator skor penilaian tingkat kesehatan BUMN yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 14 Daftar Skor Penilaian Umur Rata-Rata Persediaan**

| CP = x<br>(hari)   | Perbaikan = x<br>(hari) | Skor  |           |
|--------------------|-------------------------|-------|-----------|
|                    |                         | Infra | Non Infra |
| $x \leq 60$        | $35 < x$                | 4     | 5         |
| $60 < x \leq 90$   | $30 < x \leq 35$        | 3,5   | 4,5       |
| $90 < x \leq 120$  | $25 < x \leq 30$        | 3     | 4         |
| $120 < x \leq 150$ | $20 < x \leq 25$        | 2,5   | 3,5       |
| $150 < x \leq 180$ | $15 < x \leq 20$        | 2     | 3         |
| $180 < x \leq 210$ | $10 < x \leq 15$        | 1,6   | 2,4       |
| $210 < x \leq 240$ | $6 < x \leq 10$         | 1,2   | 1,8       |
| $240 < x \leq 270$ | $3 < x \leq 6$          | 0,8   | 1,2       |
| $270 < x \leq 300$ | $1 < x \leq 3$          | 0,4   | 0,6       |
| $300 < x$          | $0 < x \leq 1$          | 0     | 0         |

*Sumber: Zarkasyi (2008 : 57)*

**(g) Perputaran Total Aset (TATO)**

”Total assets turnover menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan di dalam menghasilkan volume penjualan tertentu” (Syamsuddin, 2009:62). Dalam menghitung Perputaran Total Aset, menurut Zarkasyi secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TATO = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Sumber: Zarkasyi (2008:58)

”Total Pendapatan adalah total pendapatan usaha dan non usaha, tidak termasuk pendapatan hasil penjualan aktiva tetap. Sedangkan *Capital Employed* adalah posisi pada akhir tahun buku total aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan” (Zarkasyi, 2008:57). Hasil perhitungan Perputaran Total Aset tersebut kemudian disesuaikan dengan indikator skor penilaian tingkat kesehatan BUMN yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 15 Daftar Skor Penilaian Perputaran Total Aset**

| TATO = x<br>(%) | Perbaikan = x<br>(%) | Skor  |           |
|-----------------|----------------------|-------|-----------|
|                 |                      | Infra | Non Infra |
| 120 < x         | 20 < x               | 4     | 5         |
| 105 < x ≤ 120   | 15 < x ≤ 20          | 3,5   | 4,5       |
| 90 < x ≤ 105    | 10 < x ≤ 15          | 3     | 4         |
| 75 < x ≤ 90     | 5 < x ≤ 10           | 2,5   | 3,5       |
| 60 < x ≤ 75     | 0 < x ≤ 5            | 2     | 3         |
| 40 < x ≤ 60     | x ≤ 0                | 1,5   | 2,5       |
| 20 < x ≤ 40     | x < 0                | 1     | 2         |
| x ≤ 20          | x < 0                | 0,5   | 1,5       |

Sumber: Zarkasyi (2008 : 58)

**(h) Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset (TMS)**

Rasio ini merupakan tingkat perbandingan antara modal sendiri dengan aktiva yang dimiliki perusahaan. Total modal sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri pada akhir tahun diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya. Sedangkan total aset adalah total aset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang bersangkutan (Zarkasyi, 2008:59).

Dalam menghitung Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TMS = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

*Sumber: Zarkasyi (2008:59)*

Hasil perhitungan Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset tersebut kemudian disesuaikan dengan indikator skor penilaian tingkat kesehatan BUMN yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 16 Skor Penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset**

| TMS terhadap TA = x (%) | Skor  |           |
|-------------------------|-------|-----------|
|                         | Infra | Non Infra |
| $x < 0$                 | 0     | 0         |
| $0 \leq x < 10$         | 2     | 4         |
| $10 \leq x < 20$        | 3     | 6         |
| $20 \leq x < 30$        | 4     | 7,25      |
| $30 \leq x < 40$        | 6     | 10        |
| $40 \leq x < 50$        | 5,5   | 9         |
| $50 \leq x < 60$        | 5     | 8,5       |
| $60 \leq x < 70$        | 4,5   | 8         |
| $70 \leq x < 80$        | 4,25  | 7,5       |
| $80 \leq x < 90$        | 4     | 7         |
| $90 \leq x < 100$       | 3,5   | 6,5       |

*Sumber: Zarkasyi (2008 : 59)*

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis deskriptif, jika ditinjau dari rumusan masalah, dan waktu penelitian,. Penelitian deskripsi, untuk mendeskripsikan atau membuat gambaran secara sistematis mengenai kondisi-kondisi PT. Petrokimia Gresik secara faktual dan akurat tentang penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.

Deskripsi penerapan *Good Corporate Governance* diutamakan pada aspek keuangan yang meliputi analisis rasio-rasio keuangan, antara lain rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio *leverage*. Angka rasio yang diperoleh selanjutnya diberi skor sesuai bobot masing-masing ukuran tingkat kesehatan BUMN.

#### B. Variabel Penelitian

Istilah variabel dapat diartikan bermacam-macam. “Dalam hal ini variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Sering pula dinyatakan variabel penelitian itu sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti” (Wirartha, 2006:220). Variabel pada suatu penelitian ditentukan oleh landasan teorinya. Apabila landasan teorinya berbeda-beda, maka variabel yang digunakan pun berbeda-beda. Variabel-variabel yang telah diidentifikasi perlu diklasifikasikan sesuai jenis dan peranannya dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel. Variabel-variabel yang digunakan yaitu rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar dan rasio kas. Rasio profitabilitas terdiri dari *Return On Investment* dan *Return On Equity*. Rasio aktivitas terdiri dari perputaran persediaan, perputaran total aset, dan *collection periods*. Rasio *Leverage* terdiri dari rasio modal sendiri terhadap total aset.

### C. Pemilihan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang akurat, absah, valid, dan yang diperlukan dalam penelitian. Lokasi perusahaan yang dipilih adalah perusahaan BUMN, yakni PT. Petrokimia Gresik.

Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena PT. Petrokimia Gresik merupakan salah satu perusahaan BUMN yang telah menerapkan *Good Corporate Governance* dan telah mendapat penghargaan yang berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance*.

### D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Dalam melakukan penelitian, data yang digunakan dibagi kedalam dua klasifikasi jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sekaran (2007:77) sumber data terdiri atas :

1. Sumber Primer

Sumber primer penelitian berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, hasil wawancara dengan informan atau pihak yang terkait di lapangan khususnya yang terlibat dalam komite *Corporate Governance* dan karyawan bagian keuangan.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan tahunan PT. Petrokimia Gresik yang telah tersusun dalam arsip yang biasanya dipublikasikan melalui internet. Dan yang tidak dipublikasikan seperti laporan kerja karyawan setempat mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga macam teknik atau metode pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Observasi dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dengan pengamatan langsung pada objek studi yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses saat peneliti memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab secara tatap muka langsung dengan nara sumber.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan jenis sumber sekunder yang diperoleh dari media perantara ataupun data yang telah dibuat dan diolah oleh pihak lain. Dalam metode ini, peneliti menyalin kembali arsip, keterangan, gambar atau dokumen yang telah tersedia pada objek pengamatan.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan agar kegiatan penelitian menjadi sistematis dan mudah dilakukan. Adapun instrumen yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

### 1. Pedoman Observasi

Instrumen penelitiannya adalah peralatan-peralatan panca indra yang digunakan pada saat penelitian, khususnya di lokasi PT. Petrokimia Gresik antara lain *name tag*, almamater, dan buku pedoman yang diberikan oleh perusahaan.

### 2. Pedoman Wawancara

Instrumen penelitiannya adalah lembar kertas yang memuat daftar pertanyaan yang kemudian ditanyakan pada saat melakukan wawancara. Selain itu, menggunakan aplikasi *recording* pada *handphone* untuk merekam hasil wawancara dan alat tulis menulis lainnya untuk mencatat hasil wawancara.

### 3. *Field Note* / Dokumentasi

Catatan lapangan adalah catatan yang berisi pokok-pokok informasi yang diperoleh peneliti selama melakukan wawancara maupun penelitian di

lapangan. Alat yang digunakan berupa kertas catatan lapangan dan bolpoin yang diperlukan untuk mencatat data yang diperoleh, diamati, dan dialami dalam rangka pengumpulan data di lapangan.

### G. Analisis Data

Penilaian aspek keuangan dari sebuah perusahaan BUMN memiliki kriteria bobot tersendiri. Untuk BUMN Infrastruktur sebesar 50% dan untuk BUMN Non Infrastruktur sebesar 70%. Sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN tahun 2002 BUMN infrastruktur adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, sedangkan BUMN Non Infrastruktur adalah BUMN yang bidang usahanya diluar bidang usaha BUMN Infrastruktur.

Dalam penelitian ini, setelah data yang diperlukan diperoleh maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis. Analisis data dapat dipergunakan sebagai alat ukur untuk menelaah suatu permasalahan dengan cara yang lebih baik dan mendalam, dengan cara mencari dan mengetahui ciri-ciri masalah untuk dipecahkan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data yaitu:

1. Melihat dan mengumpulkan data mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pada aspek keuangan lalu dianalisis dengan cara menggolongkannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dan memeriksa pelaksanaannya.
2. Melakukan analisis penilaian kinerja aspek keuangan berbasis akuntansi melalui teknik analisis sebagai berikut :

- a. Analisis perbandingan laporan keuangan untuk mengetahui perubahan pada pos-pos laporan keuangan selama dua atau lebih periode yang diperbandingkan.
- b. Analisis rasio yang digunakan pada penelitian ini tidak secara lengkap, hanya yang sesuai standar ketetapan penilaian kinerja dari perusahaan.

Rasio-rasio keuangan yang digunakan antara lain :

1. Rasio Likuiditas
    - a. Rasio Lancar
    - b. Rasio Kas
  2. Rasio Profitabilitas
    - a. *Return On Investment* (ROI)
    - b. *Return On Equity* (ROE)
  3. Rasio Aktivitas
    - a. Perputaran Persediaan
    - b. Perputaran Total Aset (TATO)
    - c. *Collection Period*
  4. Rasio Leverage
    - a. Rasio Modal Sendiri dengan Total Aset
3. Membandingkan kenyataan yang ada pada lapangan dengan standar ideal teori.
  4. Mengamati permasalahan atau kendala yang dihadapi perusahaan dalam penerapan *Good Corporate Governance*.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Perusahaan

##### 1. Profil dan Sejarah Singkat

PT. Petrokimia Gresik merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernaung di bawah  *Holding Company*  PT. Pupuk Sriwijaya Palembang. PT. Petrokimia Gresik memiliki bidang usaha yang meliputi industri pupuk, industri pestisida, industri kimia, industri peralatan pabrik, jasa rancang bangun dan perekayasaan serta jasa lainnya.

Nama Petrokimia berasal dari kata "*Petroleum Chemical*" yang kemudian disingkat "*Petrochemical*", yaitu bahan-bahan kimia yang dibuat dari minyak dan gas alam. Pada mulanya, pabrik pupuk ini disebut Proyek Petrokimia Surabaya. Proyek ini dibentuk berdasarkan Ketetapan MPRS No. II Tahun 1960 yang dicantumkan sebagai proyek prioritas dalam pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap I (1961-1969). Pembangunan proyek ini berdasarkan atas Instruksi Presiden No. I tahun 1963 dan dinyatakan sebagai proyek vital yang sesuai dengan Surat Keputusan Presiden No. 225 Tahun 1963.

##### (a) Visi dan Misi Perusahaan

Visi PT. Petrokimia Gresik adalah "*Menjadi produsen pupuk dan produsen lainnya yang berdaya dan produksinya paling diminati oleh konsumen*".

Misi Perusahaan adalah :

- (1) Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya program swasembada pangan.

- (2) Meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan pengembangan usaha.
- (3) Mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional dan berperan aktif dalam *community development*.

#### **(b) Nilai-Nilai Dasar Perusahaan**

Nilai-nilai dasar yang dijadikan sebagai pedoman dalam operasional perusahaan adalah:

- (1) Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan operasional.
- (2) Memanfaatkan profesionalisme untuk peningkatan kepuasan pelanggan.
- (3) Meningkatkan inovasi untuk memenangkan bisnis.
- (4) Mengutamakan integritas di atas segala hal.
- (5) Berupaya membangun semangat kelompok yang sinergistik.

#### **(c) Lokasi perusahaan**

PT. Petrokimia Gresik terletak dalam lingkup Kawasan Industri PT. Petrokimia Gresik yang meliputi 3 kecamatan yang tersebar dalam 10 desa. Dimana luas keseluruhan areal sebesar 450 Hektar. Wilayah perusahaan pada Kecamatan Gresik meliputi Desa Ngipik, Karangturi, Sukorame, dan Tlogo Pojok. Kecamatan Kebomas meliputi desa Kebomas, Randu Agung, dan Tlogo Patut. Kecamatan Manyar meliputi desa Romo Meduran, Tepen, dan Pojok Pesisir.

Gresik dipilih sebagai lokasi pembangunan pabrik pupuk setelah mendapatkan hasil studi kelayakan yang dikeluarkan oleh Badan Persiapan

Proyek-proyek Industri (BP3I) yang dikoordinir Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan. Dipilihnya Gresik sebagai lokasi pembangunan dengan pertimbangan antara lain :

- (1) Menempati lahan yang kurang produktif untuk pertanian sehingga tidak mengurangi areal pertanian.
- (2) Cukup dekat dengan sumber air yaitu aliran Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo.
- (3) Berdekatan dengan pelabuhan sehingga memudahkan untuk bongkar muat dan pendistribusian hasil produksi.

Dalam perjalanannya sebagai perusahaan BUMN, status PT. Petrokimia Gresik mengalami beberapa kali perubahan antara lain :

- 1) Proyek Petrokimia Surabaya (1963-1971)
- 2) Perusahaan Umum Petrokimia (1971-1975)
- 3) PT. Petrokimia Gresik (Persero) (1975-1977)
- 4) PT. Petrokimia Gresik dengan status Holding (1997-sekarang)  
Company bersama PT. Pupuk Sriwijaya.

#### **(d) Bidang Usaha**

Produk-produk yang dihasilkan PT. Petrokimia Gresik antara lain:

- 1) Produk Pupuk

Meliputi *Urea*, ZA, TSP, SP-36, DAP, Phonska, NPK Kebomas, ZK, KCl, *Rock Phosphate*, *Ammonium Phosphate*, dan Petroganik.

- 2) Produk Bahan Kimia

Meliputi Amoniak, Asam Sulfat, Asam Fosfat, Aluminium Fluorida, *Gypsum*, *Cement Retarder*, Nitrogen, CO<sub>2</sub> Cair, *Dry Ice*, dan Asam Klorida.

3) Jasa

Meliputi rancang bangun dan perkerajaan, fabrikasi dan konstruksi, permesinan suku cadang dan peralatan, pengoperasian pabrik, pemeliharaan pabrik, analisa uji kimia dan elektronik, komputerisasi, pendidikan dan latihan serta pemeriksaan teknik dan korosi.

**(e) Produk yang Dihasilkan PT. Petrokimia Gresik**

PT. Petrokimia Gresik memproduksi beberapa pupuk, antara lain pupuk anorganik yang meliputi urea, ZA, SP-36, dan sebagainya, pupuk organik, pupuk hayati, dan pupuk cair. Selain memproduksi pupuk, PT. Petrokimia Gresik juga memproduksi bahan kimia seperti ammoniak, CO<sub>2</sub> cair, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, serta bahan kimia lainnya.

Produksi pada PT. Petrokimia Gresik dibagi dalam tiga wilayah pabrik, yaitu :

1) Pabrik I

Hasil produksi dari Pabrik I meliputi :

- a) Pupuk Urea
- b) Pupuk ZA I dan III
- c) Bahan kimia (ammoniak, CO<sub>2</sub> cair, O<sub>2</sub>, dan N<sub>2</sub> Cair).

2) Pabrik II

Hasil produksi dari Pabrik II meliputi :

- a) Pupuk SP-36
  - b) Pupuk Phonska
  - c) Pupuk ZK
  - d) NPK Kebomas
  - e) Bahan kimia HCL
- 3) Pabrik III

Hasil produksi dari Pabrik III meliputi :

- a) Pupuk ZA
- b) Bahan kimia ( $H_2SO_4$ ,  $H_3PO_4$ , CR, dan  $AlF_3$ ).

## 2. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan alur koordinasi dan hubungan struktural antara beberapa organ perusahaan yang berkaitan satu dengan lainnya dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi perusahaan yang dibebankan atas suatu jabatan tertentu dalam rangka usaha untuk mencapai suatu tujuan. Dalam melaksanakan alur koordinasi perusahaan, PT. Petrokimia Gresik menerapkan garis lini yang menggambarkan adanya perintah secara mengalir dari atas ke bawah dalam struktur organisasinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran gambar 4.1

Sesuai dengan risalah umum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 12 Nopember 2010, stuktur organisasi perusahaan dapat dilihat pada gambar lampiran 1. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas memanaajemen perusahaan, Direksi sebagai pengambilan keputusan tertinggi dalam struktural

perusahaan dengan pengawasan dewan Komisaris. Direksi PT. Petrokimia Gresik saat ini adalah :

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Direktur Utama                 | : Ir. Hidayat Nyakman, MSIE, M.A |
| Direktur Produksi              | : Ir. Mulyono Prawiro, MBA       |
| Direktur SDM dan Umum          | : Ir. Koeshartono, M.M           |
| Direktur Teknik & Pengembangan | : Ir. Firdaus Syahril            |
| Direktur Komersial             | : Drs. T. Nugroho Purwanto, Ak   |

Agar Direksi perusahaan tetap dalam koridor saat menjalankan fungsi perusahaan demi kepentingan pemegang saham dan perusahaan, maka dibentuk dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan secara umum maupun khusus serta memberikan nasihat pada Direksi. Mengacu pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 18 Januari 2011, jumlah dewan Komisaris sebanyak 6 orang dengan struktur sebagai berikut :

|                 |   |
|-----------------|---|
| Komisaris Utama | : Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, M.s, DAA |
| Komisaris       | : Drs. Julian Aldrin Pasha, M.A, Ph.D     |
|                 | : Drs. Imam Apriyanto Putro, M.M          |
|                 | : Ir. Musthofa                            |
|                 | : Romulo Robert Simbolon, S.sos, M.M      |
|                 | : Drs. Muhammad Zamkhani, Ak, MBA         |

Untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, PT. Petrokimia Gresik memiliki 3.347 karyawan yang terdiri dari beberapa tingkat pendidikan. Jumlah karyawan didominasi oleh lulusan SLTA karena lulusan SLTA digunakan

terutama untuk memenuhi kebutuhan operator di unit produksi dan pemeliharaan.

Pembagian tingkat pendidikan disajikan pada tabel 17.

**Tabel 17 Tingkat Pendidikan Terakhir Karyawan**

| Pendidikan Akhir | Jumlah (orang) |
|------------------|----------------|
| Pasca Sarjana    | 103            |
| Sarjana          | 468            |
| SLTA             | 2.466          |
| SLTP             | 215            |
| Jumlah           | 3.347          |

*Sumber : PT. Petrokimia Gresik, 2012*

Untuk data karyawan menurut jenjang struktur jabatan dalam organisasi dijelaskan pada tabel 18.

**Tabel 18 Jenjang Jabatan Karyawan**

| Jabatan           | Jumlah (orang) |
|-------------------|----------------|
| Eselon I          | 24             |
| Eselon II         | 72             |
| Eselon III        | 195            |
| Eselon IV         | 489            |
| Eselon V          | 1.012          |
| Pelaksana         | 1.501          |
| Bulanan percobaan | 54             |
| Jumlah            | 3.347          |

*Sumber : PT. Petrokimia Gresik, 2012*

Waktu efektif kerja karyawan 5 hari dalam seminggu, yaitu senin hingga jum'at dari pukul 07.00 – 16.00 WIB. Untuk optimalisasi dan kontrol kinerja pabrik yang bekerja selama 24 jam, karyawan bagian operator dan pemeliharaan pabrik dibagi dalam 3 shift, yaitu :

Shift I : 07.00 - 15.00 WIB

Shift II : 15.00 – 23.00 WIB

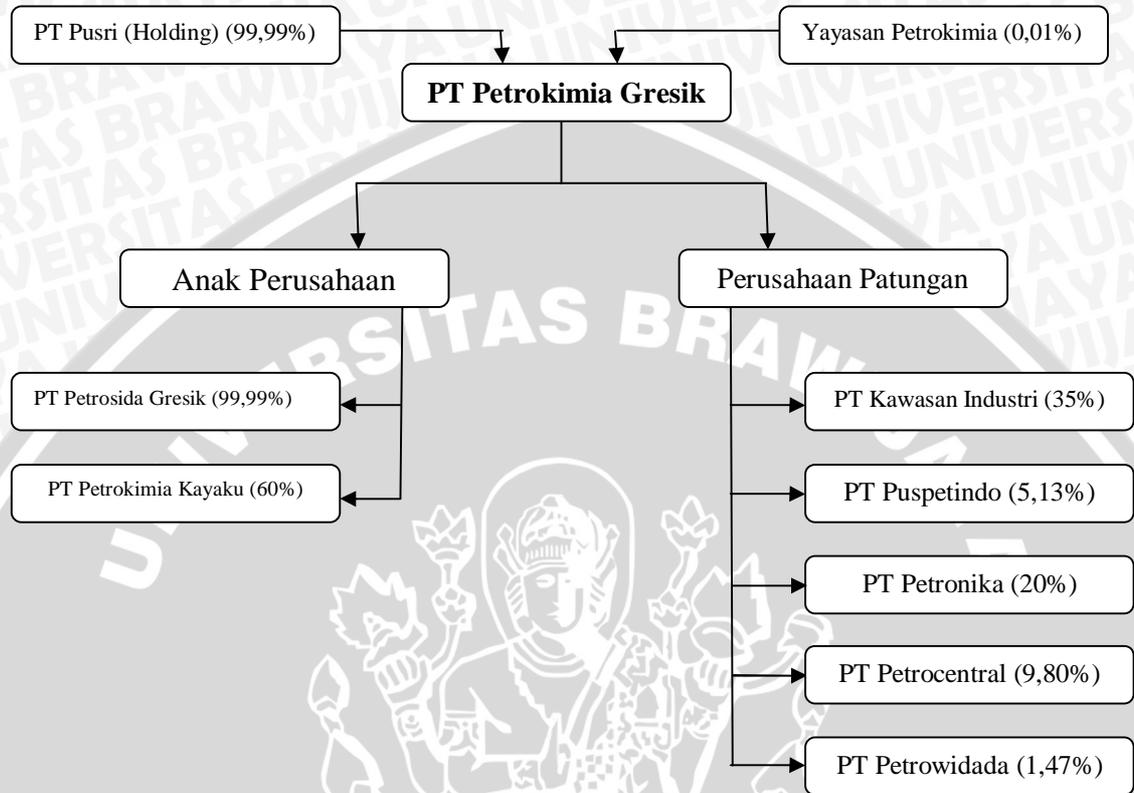
Shift III : 23.00 – 07.00 WIB

### 3. Susunan Saham Perusahaan

Pemegang saham adalah pemegang / pemilik surat bukti pemilikan bagian modal Perseroan Terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 1974 juncto PP Nomor 14 Tahun 1975, Perusahaan Umum Petrokimia Gresik ditetapkan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik. Anggaran Dasar diubah dengan Akta Notaris Abdul Latif, S.H. No. 5, tanggal 4 Maret 1985, dan Akta No. 85, tanggal 19 Desember 1985, serta telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan Nomor C2-981-HT.01.04. Th.86, tanggal 8 Februari 1986, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 892 Tahun 1986.

Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1997, kedudukan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham PT. Petrokimia Gresik dialihkan kepada PT. Pupuk Sriwidjaja dengan penyertaan modal disetor penuh. Saat ini mayoritas saham (99,99%) dimiliki oleh PT. Pupuk Sriwidjaja dan sisanya (0,01%) dimiliki oleh Yayasan PT. Petrokimia Gresik. Seiring berkembangnya perusahaan, PT. Petrokimia Gresik memiliki beberapa anak perusahaan untuk sebagai mitra kerja dan menambah laba induk perusahaan. Struktur kepemilikan sahamnya sebagai berikut :



Sumber : PT. Petrokimia Gresik, 2012

**Gambar 1 Struktur Kepemilikan Saham PT. Petrokimia Gresik**

#### 4. Sumber Dana Perusahaan

Agar perusahaan dapat beroperasi dengan baik, dibutuhkan sumber dana untuk memenuhi biaya operasional perusahaan. Sumber dana PT. Petrokimia Gresik berasal dari :

1. Penjualan produk pupuk dan bahan kimia.
2. Penjualan jasa.
3. Deposito.
4. Pendapatan saham.
5. Obligasi.

## B. Penyajian Data

### 1. Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Petrokimia Gresik

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) oleh setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha adalah suatu keharusan, karena tuntutan tersebut merupakan refleksi yang memperlihatkan tentang adanya pengaruh atas paradigma untuk menegakkan prinsip etika dan moral yang bersifat universal. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan kaidah, norma ataupun pedoman perusahaan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan perusahaan yang sehat, maka untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan, pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik perlu dioptimalkan, dan agar perusahaan dapat mengoptimalkan peran serta kemampuan mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang makin terbuka dan kompetitif. Maka perusahaan perlu menumbuhkan budaya korporasi yang sehat dan profesionalisme yang tinggi, hal tersebut memerlukan komitmen bersama antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Tim manajemen serta para karyawan.

*Good Corporate Governance* bukan hanya upaya membentuk mekanisme administrasi yang baku dalam wujud manual, aturan dan daftar, tetapi lebih kepada upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku. Implementasi *Good Corporate Governance* sangat memerlukan komitmen dan niat baik seluruh organ perusahaan dalam jangka panjang demi kelangsungan hidup dan mencapai visi dan misi perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* mempunyai relevansi terhadap meningkatnya kinerja serta membaiknya citra perusahaan di

mata umum. Penerapan *Good Corporate Governance* bukanlah lagi suatu pilihan, melainkan merupakan suatu keharusan.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Petrokimia Gresik telah dilaksanakan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi terutama pada sisi pengawasan dan pengurusan. Oleh karena itu pengawasan dan pengurusan harus dilaksanakan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Upaya yang telah dilaksanakan PT. Petrokimia Gresik untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah dibentuknya Tim Penerapan *Good Corporate Governance* berdasarkan atas Nota Dinas Direksi No. 2185/08/TU.04.02/10/ND/2005, tanggal 19 Agustus 2005.

**(a) Direksi dan Dewan Komisaris**

Sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M.MBU/2002 yang terkait penerapan *Good Corporate Governance* tugas Direksi yang meliputi sebagai berikut :

- (1) Membuat dan melaporkan kepada Komisaris hasil evaluasi atas pelaksanaan kontrak manajemen (KPI) dan penyebab belum tercapainya KPI korporat secara berkala.
- (2) Memantau dan melaporkan tindak lanjut rekomendasi hasil audit atas temuan tahun-tahun sebelumnya yang masih pending atau belum tuntas.
- (3) Menyampaikan laporan bulanan dan triwulanan kepada pemegang saham (mayoritas dan minoritas) dan Komisaris secara tepat waktu dan *fair*.

- (4) Menyusun kebijakan terkait tata kelola teknologi informasi yang mengatur kebijakan umum, tahapan pengembangan dan pengendalian yang diperlukan.

**(b) Komisaris**

Sebagai organ perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan serta masukan pada Direksi. Terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance*, tugas dan tanggungjawab Komisaris adalah :

- (1) Memberikan informasi yang sama dan tepat waktu kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas.
- (2) Meninjau kembali kebijakan dan strategi manajemen resiko terkait *Good Corporate Governance* yang telah dibuat oleh Direksi.
- (3) Memberikan masukan atas RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan) dan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) serta mendorong pemegang saham agar menyetujui RJPP dan RKAP tahun-tahun mendatang.
- (4) Melaksanakan rapat dengan Direksi minimal setiap bulan sekali mengenai pengendalian internal dan sistem tata kelola perusahaan.

**(c) Komite-komite**

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik memerlukan dibentuknya komite yang membantu pekerjaan dewan Komisaris dalam rangka pengawasan kinerja perusahaan. Komite tersebut membuat beberapa usulan yang akan dilaporkan pada Komisaris. Untuk membantu pekerjaannya,

Komisaris PT. Petrokimia Gresik hanya membentuk komite audit untuk saat ini.

Komite Audit memiliki tugas antara lain :

- (1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya.
- (2) Melaporkan pelaksanaan atas rencana kerjanya kepada Komisaris secara berkala (triwulanan).
- (3) Menelaah independensi dan obyektivitas auditor eksternal.
- (4) Menilai pelaksanaan kegiatan hasil audit yang dilakukan auditor eksternal, sehingga dapat mencegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.

**(d) Satuan Pengawasan Intern (SPI)**

Satuan Pengawasan Intern adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan atau audit internal berdasarkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Direksi. Keberadaan SPI PT. Petrokimia Gresik dibentuk untuk memenuhi UU no. 19 tahun 2003 tentang BUMN, bab VI pasal 67, bahwa pada setiap BUMN dibentuk SPI yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan, dan dipimpin oleh kepala SPI yang bertanggung jawab kepada direktu utama.

Untuk mendukung terwujudnya penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten, melalui Surat Keputusan Direksi PT. Petrokimia Gresik no. 073/03/TU.04.02/07/SK/2003 ditetapkan pokok-pokok audit internal (*Internal Audit Charter*) yang didasarkan pada prinsip-prinsip

independensi, profesionalisme, integritas, obyektivitas, dan kemitraan. Dalam *Internal Audit Charter* ditetapkan tugas dan wewenang SPI meliputi :

- (1) Memeriksa dan menilai seluruh data dan informasi
- (2) Memantau tindak lanjut manajemen terhadap Laporan Hasil Audit (LHA).
- (3) Menetapkan pendekatan, metode, teknik, ruang lingkup, dan kedalaman audit.
- (4) Melakukan evaluasi, memfasilitasi, dan memberikan konsultasi terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di masing-masing unit kerja.

#### **(e) Manajemen Risiko**

Salah satu wujud dari komitmen implementasi *Good Corporate Governance* adalah dibentuknya Biro Manajemen Risiko dibawah kompartemen Perencanaan dan Pengendalian Usaha di bawah Direktur Keuangan. Manajemen risiko di definisikan sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengelola risiko meliputi proses identifikasi risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan risiko dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja. Tugas dan tanggung jawab manajemen risiko adalah :

- (1) Menyusun Pedoman Perumusan Manajemen Risiko (PPMR) dan meninjau secara periodik.
- (2) Melakukan indentifikasi risiko untuk menghasilkan profil risiko perusahaan yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa unit kerja telah melakukan siklus manajemen risiko secara benar.

- (3) Membuat laporan perkembangan penyelenggaraan risiko secara periodik kepada Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham.

## 2. Penerapan Masing-Masing Prinsip *Good Corporate Governance* pada PT.

### Petrokimia Gresik

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada PT. Petrokimia Gresik telah dilakukan sejak tahun 2005, kemudian pada tahun-tahun berikutnya telah menerapkan secara keseluruhan dengan dibuktikan dengan beberapa penghargaan serta memperoleh *assessment* dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan Perusahaan) perwakilan Jawa Timur. Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Petrokimia Gresik dapat diuraikan melalui penerapan prinsip-prinsip berikut :

#### (a) *Transparency* (transparansi)

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam menyampaikan keterbukaan informasi perusahaan secara akurat. Selain keterbukaan informasi perusahaan, keterbukaan lainnya adalah pada saat proses pengambilan keputusan perusahaan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi meteril dan relevan mengenai perusahaan kepada *stakeholders*.

Salah satu dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh PT. Petrokimia Gresik adalah transparansi dalam proses pemilihan Komisaris dan Direksi. Pada tahun 2009 terdapat pergantian satu orang Komisaris dan penambahan satu orang Komisaris. Terhadap pergantian Komisaris tersebut, proses penjangingannya dilaksanakan melalui wawancara dan disahkan oleh pemegang saham. Untuk penambahan Komisaris baru, proses penjangingan dan

*fit and proper test* dilaksanakan oleh Kementerian BUMN sehingga pemegang saham hanya mengesahkan saja.

**(b) *Accountability* (Akuntabilitas)**

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan sebuah perusahaan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban organ perusahaan. Masing-masing organ perusahaan mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan wajib melaporkan pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab tersebut guna pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

**(c) *Responsibility* (Pertanggung-jawaban)**

Perwujudan pelaksanaan prinsip pertanggung-jawaban perusahaan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Program tersebut merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar. Dalam prinsip *responsibility*, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu *Corporate value* yang direfleksikan dalam kesehatan *financial* saja, namun tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yang meliputi aspek *financial*, sosial, dan lingkungan. Kondisi *financial* saja tidak cukup menjamin tumbuh

berkembangnya perusahaan secara berkelanjutan. Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan juga memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

PT. Petrokimia Gresik mengambil peran untuk menjadikan program CSR sebagai strategi perusahaan yang diyakini sebagai investasi yang baik untuk pertumbuhan dan berkelanjutan perusahaan dimasa yang akan datang. Komitmen perusahaan untuk menerapkan program CSR ini tertuang dalam *statement* misi perusahaan sebagai wujud keseriusan untuk menerapkan program CSR. Perusahaan membentuk sebuah Biro khusus yang disebut Biro Kemitraan dan Bina Lingkungan.

**(d) *Independency* (Kemandirian)**

Tata kelola perusahaan yang baik salah satunya dapat dilihat dari penerapan prinsip kemandirian. Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Wujudnya seperti surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dengan tujuan perusahaan, dan tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun golongan yang ditanda tangani oleh setiap anggota Komisaris PT. Petrokimia Gresik. Dengan dilaksanakannya fungsi dan tugas sesuai perundangan, organ perusahaan tidak saling melempar tanggung jawab. Agar dapat terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

(e) **Fairness (Kewajaran)**

Prinsip kewajaran merupakan perlakuan yang adil dan setara terhadap hak-hak semua pihak (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar dapat terwujud secara efektif, pelaksanaan prinsip kewajaran salah satunya seperti penerapan *best practices* pada penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu poinnya terkait keterbukaan informasi yang setara, relevan, dan adil kepada semua *stakeholders*. Khususnya mengenai penyampaian informasi secara formal, sama dan tepat waktu kepada semua pemegang saham.

**3. Kendala yang dihadapi PT. Petrokimia Gresik dalam Penerapan *Good Corporate Governance***

Dalam melaksanakan tata kelola yang baik perusahaan selalu menghadapi berbagai hambatan dan kendala. Meskipun secara garis besar penerapan tata kelolanya telah dinyatakan baik, PT. Petrokimia Gresik selalu berupaya untuk mengatasi dan mengambil kebijakan agar segala kendala tersebut segera diatasi atau minimal berkurang. Persaingan usaha dituntut untuk meminimalisir segala bentuk kendala atau kekurangan yang akan berakibat pada kinerja maupun citra perusahaan.

Saat menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang baik, PT. Petrokimia Gresik menghadapi beberapa kendala. Kendala yang dihadapi sebagai berikut:

- (a) Sistem Manajemen dan Organ Perusahaan.
- (b) Aplikasi dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.

Salah satu sebab munculnya kendala yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* adalah penegakan hukum dan pemegang otoritas yang masih lemah atau tidak tegas. Berikut adalah uraian yang lebih rinci dari kendala apa saja yang dihadapi PT. Petrokimia Gresik :

**(a) Sistem Manajemen dan Organ Perusahaan**

Secara umum dan garis besar penerapan tata kelola perusahaan yang baik telah diterapkan sungguh-sungguh oleh manajemen dan memperoleh nilai yang baik dari *assessor* BPKP. Ada beberapa hal yang menjadikan kendala dalam menerapkan secara khusus tata kelola perusahaan yang baik. Sesuai dengan data yang diperoleh saat penelitian, bahwa salah satu anggota Komisaris merupakan orang dekat Presiden. Sebenarnya sah-sah saja menggunakan Komisaris yang memiliki sosok yang disegani serta memiliki akses dekat pada Presiden. Budaya nepotisme di Indonesia masih belum dapat dihapuskan. Ini bisa sebagai titik lemah PT. Petrokimia Gresik dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Pesaing bisa saja mencurigai adanya unsur nepotisme yang dilakukan PT. Petrokimia Gresik. Meskipun sebenarnya tidak terjadi tindakan tersebut, sebaiknya jabatan Komisaris haruslah diangkat berdasarkan kompetensi serta integritasnya selama ini. Kendala lainnya dalam sistem manajemen dan organ perusahaan yaitu tidak semua karyawan mengetahui dan memahami tujuan dan manfaat *Good Corporate Governance*. Sebaiknya manajemen harus mensosialisasikan poin-poin tujuan dan indikator keberhasilan yang harus dicapai agar PT. Petrokimia

Gresik mendapat nilai *assessment* yang tinggi dari BPKP untuk penerapan *Good Corporate Governance*.

**(b) Aplikasi dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.**

Permasalahan lain yang timbul selain sistem manajemen dan organ perusahaan adalah masalah transparansi perusahaan. Transparansi merupakan salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sistem pemberian insentif yang diberikan kepada Direksi dan Komisaris belum sepenuhnya dilaksanakan secara transparan yang sesuai dengan *best practices* penerapan *Good Corporate Governance*. Karena RUPS belum menetapkan dan menerapkan sistem insentif berbasis kinerja untuk Komisaris dan Direksi. Sebaiknya insentif yang diberikan untuk Direksi dan Komisaris harus benar-benar berbasis kinerja dan didasarkan pada prestasi kerja atau tingkat kontribusi masing-masing anggota Direksi dan Komisaris untuk kemajuan perusahaan.

**C. Pembahasan Data**

**1. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Kinerja Keuangan**

Penerapan tata kelola yang baik akan berdampak bagi perusahaan yang benar-benar melaksanakannya, karena akan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan efektifitas kinerja akan tercapai khususnya kinerja keuangan. Pembahasan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik pada kinerja keuangan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu pada :

(a) Penerapan prinsip *Good Corporate Governance*

(b) Aspek Keuangan Perusahaan

Penjelasan yang lebih rinci penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada kinerja keuangan PT. Petrokimia Gresik sebagai berikut :

**(a) Penerapan prinsip *Good Corporate Governance***

**(1) *Transparency* (Transparansi)**

**a) Transparansi Dalam Penyampaian Laporan Tahunan**

Transparansi dalam penyampaian laporan tahunan PT. Petrokimia Gresik sebagai salah satu BUMN dan perusahaan publik wajib memberikan laporan perhitungan tahunan pada Kementerian BUMN serta para *stakeholders*. Transparansi dalam menyampaikan laporan ini sudah wajib di sampaikan paling lambat akhir bulan kelima setelah tahun tutup buku. PT. Petrokimia Gresik selalu berusaha membuat laporan perhitungan tahunan paling lama kurang dari 5 bulan. Sejak tahun 2009 hingga 2011, PT. Petrokimia Gresik selalu membuat kurang dari 4 bulan. Skor yang dapat diperoleh perusahaan selalu maksimal. Berdasarkan skor penilaian jangka waktu penyampaian laporan tahunan dalam Tabel 1, skor yang diperoleh disajikan dalam Tabel 19 sebagai berikut :

**Tabel 19 Skor Hasil Penilaian Penyampaian Laporan**

| <b>Tahun</b> | <b>Jangka Waktu Penyampaian</b>   | <b>Skor</b> |
|--------------|---|-------------|
| 2009         | Kurang dari bulan ke-empat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup | 5           |
| 2010         | Kurang dari bulan ke-empat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup | 5           |
| 2011         | Kurang dari bulan ke-empat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup | 5           |

*Sumber : PT. Petrokimia Gresik, 2012*

## b) Transparansi Dalam Penyampaian RKAP

Tujuan dibuatnya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) agar perusahaan memiliki perencanaan program kerja dalam melakukan operasional perusahaan. Transparansi dalam menyampaikan rancangan RKAP, PT. Petrokimia Gresik menetapkan anggaran perusahaan agar tidak kelebihan kapasitas perusahaan serta tidak terjadinya *over cost*. PT. Petrokimia Gresik dari tahun 2009 hingga 2011 selalu membuat rancangan RKAP kurang dari dua bulan sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan. Perolehan skor yang didapat selalu maksimal. Berdasarkan skor penilaian rancangan RKAP dalam Tabel 2, skor yang diperoleh disajikan dalam Tabel 20 sebagai berikut :

**Tabel 20 Skor Hasil Penilaian Penyampaian RKAP**

| Tahun | Jangka Waktu Penyampaian   | Skor |
|-------|--|------|
| 2009  | Kurang dari dua bulan sebelum memasuki tahun anggaran bersangkutan | 3    |
| 2010  | Kurang dari dua bulan sebelum memasuki tahun anggaran bersangkutan | 3    |
| 2011  | Kurang dari dua bulan sebelum memasuki tahun anggaran bersangkutan | 3    |

Sumber : PT. Petrokimia Gresik, 2012

## c) Transparansi Dalam Penyampaian Laporan Periodik

Laporan periodik merupakan laporan sementara perusahaan dalam satu tahun buku yang harus diterima Komisaris dan pemegang saham. Laporan periodik tersebut dapat dibuat per 3 bulan atau 6 bulan. Transparansi dalam menyampaikan laporan periodik, PT. Petrokimia

Gresik membuat laporan periodik setiap 3 bulan sekali dalam satu tahun buku. Laporan periodik bermanfaat agar fungsi pengawasan oleh Komisaris dan pemegang saham berjalan dengan baik. Agar kinerja perusahaan terus dapat dipantau selama tahun buku berjalan. PT. Petrokimia Gresik selalu menyampaikan laporan periodik kurang dari 30 hari setelah berakhirnya periode laporan, sehingga skor penilaian selalu maksimal. Berdasarkan skor penilaian laporan periodik dalam tabel 3, skor yang diperoleh disajikan dalam Tabel 21 sebagai berikut :

**Tabel 21 Skor Hasil Penilaian Penyampaian Laporan Periodik**

| <b>Tahun</b> | <b>Jangka Waktu Penyampaian</b>                         | <b>Skor</b> |
|--------------|---|-------------|
| 2009         | Kurang dari 30 hari setelah berakhirnya periode laporan | 2           |
| 2010         | Kurang dari 30 hari setelah berakhirnya periode laporan | 2           |
| 2011         | Kurang dari 30 hari setelah berakhirnya periode laporan | 2           |

*Sumber : PT. Petrokimia Gresik, 2012*

## **(2) Responsibility (Pertanggung-jawaban)**

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang tidak hanya mementingkan kinerja keuangan dan laba perusahaan saja, melainkan perlu memberikan perhatian pada masyarakat sekitar melalui program-program tanggung jawab sosial. PT. Petrokimia Gresik memberikan perhatian pada masyarakat sekitar pabrik dengan dua program kegiatan, yaitu Bina Lingkungan dan Kemitraan. Realisasi dana kegiatan Bina Lingkungan dan Kemitraan ditunjukkan pada Tabel 22.

**Tabel 22 Jenis Bantuan dan Persentase Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

| Tahun | Jenis Bantuan (Rp ribu) |            |
|-------|-------------------------|------------|
|       | Bina Lingkungan         | Kemitraan  |
| 2009  | 15.895.701              | 26.097457  |
| 2010  | 2.320.391               | 14.341.812 |
| 2011  | 12.560.962              | 20.681.766 |

Sumber : PT. Petrokimia Gresik, 2012

Setelah mengetahui jenis bantuan dan persentase tanggung jawab sosial PT. Petrokimia Gresik, berdasarkan skor penilaian dalam tabel 4 skor yang diperoleh disajikan dalam Tabel 23 sebagai berikut

**Tabel 23 Skor Penilaian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

| Tahun | Persentase (%)         |                        | Skor                   |                        |
|-------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|       | Efektifitas Penyaluran | Tingkat Kolektabilitas | Efektifitas Penyaluran | Tingkat Kolektabilitas |
| 2009  | 90                     | 72                     | 2                      | 3                      |
| 2010  | 92                     | 72                     | 3                      | 3                      |
| 2011  | 92                     | 72                     | 3                      | 3                      |

Sumber : PT. Petrokimia Gresik, 2012

#### (b) Aspek Keuangan Perusahaan

Tingkat kinerja suatu perusahaan dapat dinilai dengan serangkaian evaluasi yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Salah satu evaluasi tingkat kinerja perusahaan adalah mengevaluasi aspek kinerja keuangan perusahaan. PT. Petrokimia Gresik merupakan salah satu BUMN yang kegiatannya tidak menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga termasuk dalam golongan BUMN non infrastruktur. Aspek keuangan yang dievaluasi dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* meliputi :

### (1) Return On Equity (ROE)

*Return On Equity* merupakan suatu pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Dalam menghitung *Return on Equity* secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Sumber: Zarkasyi (2008:52)

Berdasarkan skor penilaian dalam tabel 9, hasil skor perhitungan ROE disajikan dalam Tabel 24 sebagai berikut :

**Tabel 24 Perhitungan ROE**

| Tahun | Laba Setelah Pajak | Modal Sendiri | ROE    | Skor |
|-------|--------------------|---------------|--------|------|
| 2009  | 700.783            | 2.705.261     | 25,90% | 20   |
| 2010  | 818.839            | 3.863.096     | 21,19% | 20   |
| 2011  | 933.658            | 4.709.913     | 19,82% | 20   |

Sumber : PT. Petrokimia Gresik, 2012

Berdasarkan perhitungan ROE diatas skor penilaian kinerja keuangan PT. Petrokimia Gresik dari tahun 2009-2011 adalah 20. Skor ini merupakan pencapaian skor maksimal ROE untuk BUMN non infrastruktur. Pencapaian ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan perusahaan terjadi penurunan dalam tiga tahun terakhir.

### (2) Return On Investment (ROI)

*Return On Investment* (ROI) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan

jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Dalam menghitung ROI secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ROI = \frac{EBIT + Penyusutan}{Capital\ Employed} \times 100\%$$

Sumber: Zarkasyi (2008:53)

Berdasarkan skor penilaian dalam tabel 10, hasil skor perhitungan ROI disajikan dalam Tabel 25 sebagai berikut :

**Tabel 25 Perhitungan ROI**

| Tahun | EBIT+Penyusutan        | Total Aktiva-Aktiva dalam pelaksanaan | ROI    | Skor |
|-------|------------------------|---------------------------------------|--------|------|
| 2009  | 1.496.279+<br>230.547  | 8.116.212 - 558.170                   | 22,84% | 15   |
| 2010  | 1.873.782 +<br>346.615 | 9.980.338 – 1.488.957                 | 26,14% | 15   |
| 2011  | 2.087.752 +<br>376.431 | 12.162.602 – 3.441.635                | 28,25% | 15   |

Sumber : PT. Petrokimia Gresik, 2012

Berdasarkan perhitungan ROI diatas, PT. Petrokimia Gresik pada tiga tahun terakhir mengalami peningkatan pada tahun 2010 dan penurunan pada tahun 2011. ROI ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dengan jumlah aktiva tertentu yang tersedia dalam perusahaan pada tahun buku yang bersangkutan. Skor yang diberikan adalah 20.

**(3) Cash Ratio**

Cash Ratio lebih mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang lancarnya lebih tepat waktu. Dalam menghitung Cash Ratio secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Cash\ Ratio = \frac{Kas + Bank + Surat\ berharga\ jangka\ pendek}{Hutang\ Lancar} \times 100\%$$

Sumber: Zarkasyi (2008:54)

Berdasarkan skor penilaian dalam tabel 11, hasil skor perhitungan *Cash Ratio* disajikan dalam Tabel 26 sebagai berikut :

**Tabel 26 Perhitungan *Cash Ratio***

| Tahun | Kas+Bank+Surat Berharga Jk. Pendek | Hutang Lancar | <i>Cash Ratio</i> | Skor |
|-------|------------------------------------|---------------|-------------------|------|
| 2009  | 663.122                            | 3.972.914     | 16,69%            | 3    |
| 2010  | 688.574                            | 4.247.286     | 16,21%            | 3    |
| 2011  | 770.645                            | 4.895.286     | 15,74%            | 3    |

Sumber : PT. Petrokimia Gresik, 2012

PT. Petrokimia Gresik pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Skor yang diberikan adalah 3 untuk tiga tahun tersebut. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang lancarnya tepat waktu.

**(4) *Current Ratio***

Rasio lancar merupakan alat ukur likuiditas yang diperoleh dengan membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Dalam menghitung *Current Ratio* secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Sumber: Zarkasyi (2008:55)

Berdasarkan skor penilaian dalam tabel 12, hasil skor perhitungan *Current Ratio* disajikan dalam Tabel 27 sebagai berikut :

**Tabel 27 *Current Ratio***

| Tahun | Aktiva Lancar | Hutang Lancar | <i>Current Ratio</i> | Skor |
|-------|---------------|---------------|----------------------|------|
| 2009  | 5.150.849     | 3.972.914     | 129,64%              | 5    |
| 2010  | 5.578.136     | 4.247.286     | 131,33%              | 5    |
| 2011  | 5.861.972     | 4.895.286     | 119,74%              | 4    |

Sumber : PT. Petrokimia Gresik, 2012



Berdasarkan perhitungan *Current Ratio* tersebut, pada tahun 2010 PT. Petrokimia Gresik mengalami peningkatan. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang lancarnya tanpa mengeluarkan kas yang besar. Skor yang diberikan tahun 2011 adalah 4 dan dua tahun sebelumnya sebesar 5.

**(5) Collection Periods**

*Collection periods* adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menagih piutang. Dalam menghitung *Collection periods* secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Collection\ Periods = \frac{Total\ Piutang\ Usaha}{Total\ Pendapatan\ Usaha} \times 365\ hari$$

Sumber: Zarkasyi (2008:55)

*Collection Periods* merupakan kemampuan perusahaan dalam penagihan piutangnya. Semakin kecil persentase *collection periods* menunjukkan kemampuan perusahaan semakin cepat penagihan piutangnya. Persentase pada PT. Petrokimia Gresik pada tiga tahun terakhir semakin kecil. Skor yang diberikan pada tiga tahun tersebut adalah 5. Berdasarkan skor penilaian dalam tabel 13, hasil skor perhitungan *Collection Periods* disajikan dalam Tabel 28 sebagai berikut :

**Tabel 28 Perhitungan *Collection Periods***

| Tahun | Total Piutang Usaha | Total Pendapatan Usaha | <i>Collection Periods</i> |         | Skor |
|-------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------|------|
|       |                     |                        | Persentase                | Hari    |      |
| 2009  | 1.227.024           | 14.834.734             | 8,271%                    | 30 hari | 5    |
| 2010  | 1.158.586           | 16.947.485             | 6,836%                    | 25 hari | 5    |
| 2011  | 1.317.307           | 19.463.567             | 6,768%                    | 25 hari | 5    |

Sumber : PT. Petrokimia Gresik, 2012



## (6) *Inventory Turnover*

*Inventory turnover* bertujuan untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam persediaan berputar dalam setahun. Dalam menghitung Perputaran Persediaan secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Sumber: Zarkasyi (2008:56)

Perputaran persediaan pada PT. Petrokimia Gresik pada tiga tahun terakhir semakin kecil. Hasil ini menunjukkan bahwa persediaan yang ada di gudang tidak terlalu lama di timbun. Skor yang diberikan untuk tiga tahun terakhir adalah 4,5. Berdasarkan skor penilaian dalam tabel 14, hasil skor perhitungan *Inventory Turnover* disajikan dalam Tabel 29 sebagai berikut :

**Tabel 29 Perhitungan *Inventory Turnover***

| Tahun | Total Persediaan | Total Pendapatan Usaha | <i>Inventory Turnover</i> |         | Skor |
|-------|------------------|------------------------|---------------------------|---------|------|
|       |                  |                        | Persentase                | Hari    |      |
| 2009  | 3.142.505        | 14.834.734             | 21,18%                    | 77 hari | 4,5  |
| 2010  | 3.569.661        | 16.947.485             | 21,06%                    | 77 hari | 4,5  |
| 2011  | 3.620.588        | 19.463.567             | 18,60%                    | 68 hari | 4,5  |

Sumber : PT. Petrokimia Gresik, 2012

## (7) *Total Asset Turn Over*

*Total assets turn over* menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan di dalam menghasilkan volume penjualan tertentu. Dalam menghitung Perputaran Total Aset secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Sumber: Zarkasyi (2008:58)

Berdasarkan skor penilaian dalam tabel 15, hasil skor perhitungan

*Total assets turn over* disajikan dalam Tabel 30 sebagai berikut :

**Tabel 30 Perhitungan TATO**

| Tahun | Total Pendapatan | Total Aktiva-Aktiva dalam pelaksanaan | TATO    | Skor |
|-------|------------------|---------------------------------------|---------|------|
| 2009  | 14.978.881       | 8.116.212 - 558.170                   | 198,18% | 5    |
| 2010  | 17.098.810       | 9.980.338 - 1.488.957                 | 201,36% | 5    |
| 2011  | 19.622.428       | 12.162.602-3.441.635                  | 225,00% | 5    |

Sumber : PT. Petrokimia Gresik, 2012

Total perputaran aktiva merupakan ukuran efektivitas pemanfaatan aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Pada PT. Petrokimia Gresik menunjukkan penurunan pada 3 tahun terakhir. Skor yang diberikan untuk tiga tahun terakhir adalah 5.

#### **(8) Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset**

Rasio ini merupakan tingkat perbandingan antara modal sendiri dengan aktiva yang dimiliki perusahaan. Dalam menghitung Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TMS = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber: Zarkasyi (2008:59)

Rasio ini mengukur persentase antara besarnya modal sendiri dengan aktiva yang dimiliki. Semakin tinggi persentasenya menunjukkan semakin besar modal sendiri yang digunakan dalam operasional perusahaan dibandingkan dengan total aktiva. Skor yang diberikan adalah 10.

Berdasarkan skor penilaian dalam tabel 16, hasil skor perhitungan total modal sendiri terhadap total aset disajikan dalam Tabel 31 sebagai berikut :

**Tabel 31 Perhitungan Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset**

| Tahun | Total Modal Sendiri | Total Aktiva | TMS    | Skor |
|-------|---------------------|--------------|--------|------|
| 2009  | 2.705.261           | 8.116.212    | 33,33% | 10   |
| 2010  | 3.863.096           | 9.980.338    | 38,70% | 10   |
| 2011  | 4.709.913           | 12.162.602   | 38,72% | 10   |

Sumber : PT. Petrokimia Gresik, 2012

Setelah melakukan perhitungan dan pengukuran pada kinerja aspek keuangan dapat dihitung total skor yang diberikan untuk PT. Petrokimia Gresik. Ini guna menilai tingkat kesehatan perusahaan dalam tiga tahun terakhir setelah menerapkan *Good Corporate Governance*. Berdasarkan hasil perhitungan skor laporan tahunan, laporan RKAP, laporan periodik, efektifitas penyaluran, tingkat kolektabilitas, *Return On Investment*, *Return On Equity*, *Cash Ratio*, *Current Ratio*, *Collection Periods*, Perputaran Persediaan, Perputaran Total Aset, Dan Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset tersebut ditabulasikan kemudian disajikan dalam Tabel 32 sebagai berikut :

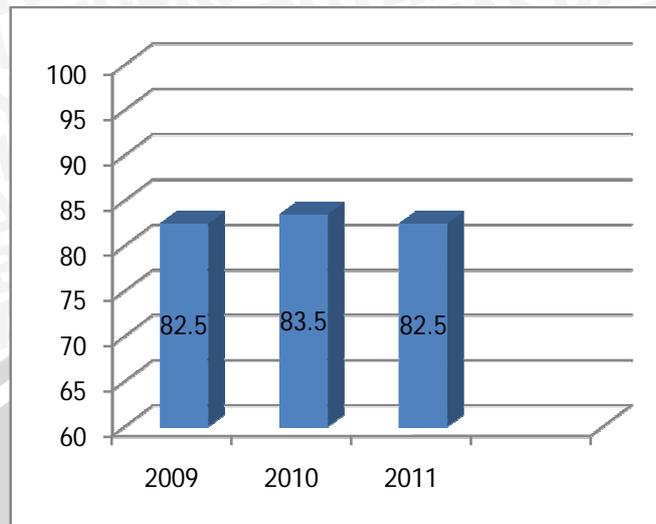
**Tabel 32 Total Bobot Pertumbuhan Kinerja PT. Petrokimia Gresik**

| Indikator               | Tahun       |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | 2009        | 2010        | 2011        |
| Laporan Tahunan         | 5           | 5           | 5           |
| RKAP                    | 3           | 3           | 3           |
| Laporan Periodik        | 2           | 2           | 2           |
| PUKK :                  |             |             |             |
| -Efektifitas Penyaluran | 2           | 3           | 3           |
| -Tingkat Kolektabilitas | 3           | 3           | 3           |
| Aspek Keuangan          |             |             |             |
| - ROE                   | 20          | 20          | 20          |
| - ROI                   | 15          | 15          | 15          |
| - Cash Ratio            | 3           | 3           | 3           |
| - Current Ratio         | 5           | 5           | 4           |
| - Collection Periods    | 5           | 5           | 5           |
| - Inventory Turnover    | 4,5         | 4,5         | 4,5         |
| - TATO                  | 5           | 5           | 5           |
| - Rasio TMS             | 10          | 10          | 10          |
| <b>Total Bobot</b>      | <b>82,5</b> | <b>83,5</b> | <b>82,5</b> |

Sumber : PT. Petrokimia Gresik, 2012

Rangkuman dari Tabel 32 tentang pertumbuhan kinerja keuangan PT.

Petrokimia Gresik disajikan pada gambar grafik berikut :



Sumber : PT. Petrokimia Gresik, 2012

**Gambar 2 Diagram Pertumbuhan Kinerja PT. Petrokimia Gresik**

#### **D. Interpretasi Data**

##### **1. Penerapan masing-masing prinsip Good Corporate Governance pada PT. Petrokimia Gresik**

PT. Petrokimia Gresik telah beberapa tahun yang lalu menerapkan *prinsip Good Corporate Governance* secara keseluruhan. Ini dibuktikan dengan memperoleh assessment dari Badan Pengawas Keuangan Perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Petrokimia Gresik dapat diuraikan melalui penerapan prinsip berikut, yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*.

Prinsip transparansi telah dilakukan dengan menyampaikan informasi kepada publik dengan terbuka, salah satu contohnya menyediakan berbagai informasi tentang perkembangan perusahaan laporan keuangan dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Penerapan prinsip akuntabilitas telah dilaksanakan

dengan baik, ini terbukti dengan pembagian tugas dan wewenang yang benar serta tidak terjadinya tumpang tindih jabatan maupun pekerjaan.

Penerapan prinsip *responsibility* diwujudkan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi masyarakat sekitar perusahaan. Program tersebut bertujuan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat serta merupakan salah satu wujud komitmen manajemen agar masyarakat sekitar merasakan keberadaan dan peranan PT. Petrokimia Gresik. Penerapan prinsip *independency* pada PT. Petrokimia Gresik telah dilaksanakan dengan baik. Wujud dari penerapan tersebut adalah dilarangnya karyawan untuk memihak salah satu kepentingan dari pihak manapun baik internal maupun eksternal, serta bersikap profesional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Prinsip terakhir yang telah dilaksanakan PT. Petrokimia Gresik adalah prinsip *fairness*. Prinsip ini juga dilaksanakan dengan baik, dibuktikan dengan penyampaian informasi secara formal, sama dan tepat waktu kepada semua *stakeholders*.

## **2. Penyelesaian kendala yang dihadapi PT. Petrokimia Gresik dalam Penerapan *Good Corporate Governance***

### **(a) Sistem Manajemen dan Organ Perusahaan**

Perusahaan sebaiknya menggunakan Komisaris yang memiliki integritas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Apabila mengangkat Komisaris yang sebagai wakil dari pemerintah dalam perusahaan, Komisaris tersebut tidak menduduki jabatan yang strategis serta tidak menjadi orang dekat pemimpin negara. Agar masyarakat dan pesaing dapat menilai bahwa perusahaan benar-benar bersih serta pelaksanaan tata kelola perusahaan yang

baik telah diterapkan. Perusahaan pun telah menghindari praktik nepotisme yang saat ini gencar di berantas pemerintah. Kendala mengenai tidak semua karyawan memahami tujuan dan manfaat *Good Corporate Governace*, manajemen harus selalu memberikan sosialisasi berkala kepada karyawan serta memberikan pemahaman pentingnya tata kelola perusahaan yang baik bagi karyawan maupun khususnya bagi citra perusahaan.

**(b) Aplikasi dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.**

Transparansi dalam perusahaan merupakan hal yang terpenting dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Meskipun prinsip yang lain juga tidak kalah pentingnya. Transparansi pada saat perusahaan memberikan insentif kepada Direksi dan Komisaris merupakan salah satu penerapan prinsip transparansi. Direksi dan Komisaris yang diberikan insentif sebaiknya sesuai dengan kompetensi dan berbasis kinerja yang dilakukan bagi perusahaan.

**3. Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Kinerja Keuangan**

Penerapan *Good Corporate Governance* pada kinerja keuangan PT. Petrokimia Gresik menunjukkan total bobot masing-masing tahun sebagai berikut, 82,5 untuk tahun 2009, 83,5 untuk tahun 2010, dan 82,5 untuk tahun 2011. Penilaian total bobot tersebut didasarkan beberapa indikator, yaitu Laporan Tahunan, rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Laporan Periodik, Efektifitas Penyaluran Bantuan, Tingkat Kolektabilitas Penyaluran Bantuan, *Return On Equity*, *Return On Investment*, *Cash Ratio*, *Current Ratio*, *Collection Periods*, *Inventory Turnover*, *Total Asset Turn Over*, dan Rasio TMS.

Penerapan prinsip transparansi Good Corporate Governance pada PT. Petrokimia Gresik dibagi menjadi tiga indikator, yaitu transparansi dalam penyampaian laporan tahunan, transparansi dalam penyampaian rancangan RKAP, dan transparansi dalam penyampaian laporan periodik. Pada tahun 2009-2011, penyampaian laporan tahunan memperoleh skor 5. Ini merupakan skor maksimal yang diperoleh berdasarkan Tabel 1, karena jangka waktu penyampaian laporan tahunan kurang dari bulan ke-4 sejak tahun buku yang bersangkutan. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada tahun 2009-2011 memperoleh skor 3. Ini merupakan perolehan skor yang maksimal berdasarkan Tabel 2, karena penyampaian RKAP sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan periodik untuk tahun 2009-2011 memperoleh skor 2. Berdasarkan Tabel 3 skor tersebut bukan pencapaian skor maksimal, karena penyampaian laporan periodik kurang dari 30 hari.

Penerapan prinsip *responsibility Good Corporate Governance* pada PT. Petrokimia Gresik dibagi menjadi dua indikator, yaitu efektifitas penyaluran bantuan dan tingkat kolektabilitas pengembalian pinjaman. Efektifitas penyaluran bantuan tanggung-jawab sosial perusahaan pada tahun 2009 memperoleh skor 2. Skor tersebut diperoleh karena jumlah dana yang disalurkan berbanding jumlah dana yang tersedia memperoleh hasil perhitungan 90%, sehingga skor yang diperoleh bukan merupakan pencapaian skor yang maksimal. Pada tahun 2010-2011 mengalami peningkatan. Skor yang diperoleh adalah 3. Skor tersebut merupakan pencapaian maksimal berdasarkan Tabel 5. Hasil perhitungannya

sebesar 92%. Tingkat kolektabilitas pengembalian pinjaman PT. Petrokimia Gresik pada tahun 2009-2011 memperoleh hasil perhitungan 72%, sehingga skor yang diperoleh berdasarkan tabel 6 adalah 3. Skor tersebut merupakan pencapaian maksimal.

Aspek keuangan dibutuhkan untuk mengevaluasi penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Aspek keuangan tersebut meliputi, *Return On Equity*, *Return On Investment*, *Cash Ratio*, *Current Ratio*, *Collection Periods*, *Inventory Turnover*, *Total Asset Turn Over*, dan Rasio TMS. Pada tahun 2009-2011, *Return On Equity* PT. Petrokimia Gresik memperoleh skor 20. Skor tersebut merupakan pencapaian maksimal berdasarkan Tabel 9, karena hasil perhitungan ROE selalu memperoleh nilai perhitungan diatas 15%. *Return On Investment* pada tahun 2009-2011 memperoleh skor 15. Berdasarkan Tabel 10, skor tersebut merupakan pencapaian maksimal. Skor tersebut diperoleh karena pada tiga tahun tersebut memperoleh nilai perhitungan diatas 18%. PT. Petrokimia Gresik memperoleh skor 3 untuk *Cash Ratio* pada tahun 2009-2011 berdasarkan pada Tabel 11. Skor tersebut diperoleh karena nilai perhitungannya diantara 15%-25%. *Current Ratio* pada tahun 2009-2010 memperoleh skor 5, karena hasil perhitungan diatas 125%. Pada tahun 2011 memperoleh skor 4. Penurunan tersebut terjadi karena hasil perhitungan pada tahun tersebut antara 110%-125%. Pemberian skor tersebut berdasarkan pada Tabel 12.

Pada tahun 2009-2011, hasil perhitungan *Collection Periods* PT. Petrokimia Gresik menunjukkan hasil bahwa penagihan piutangnya kurang dari 60 hari. Skor yang diperoleh adalah 5, ini merupakan pencapaian maksimal

berdasarkan pada Tabel 13. Hasil perhitungan *Inventory Turnover* PT. Petrokimia Gresik pada tahun 2009-2011 menunjukkan hasil bahwa tingkat persediaan yang ada di gudang antara 60-90 hari. Skor yang diperoleh adalah 4,5. Skor tersebut bukan merupakan pencapaian skor maksimal berdasarkan pada Tabel 14. Pada tahun 2009-2011, hasil perhitungan *Total Asset Turn Over* PT. Petrokimia Gresik berada diatas 120%, sehingga skor yang diperoleh adalah 5. Berdasarkan pada Tabel 15, skor tersebut merupakan pencapaian maksimal. Rasio yang terakhir adalah Rasio TMS. Tahun 2009-2011, hasil dari perhitungan tersebut antara 30%-40%. Skor yang diperoleh adalah 10, skor ini bukan merupakan pencapaian skor maksimal berdasarkan pada Tabel 16.

Total pertumbuhan kinerja keuangan PT. Petrokimia Gresik menunjukkan hasil dibawah ini :

**Tabel 33 Kriteria Penilaian Kinerja PT. Petrokimia Gresik**

| 2009     | 2010     | 2011     |
|----------|----------|----------|
| 82,5     | 83,5     | 82,5     |
| SEHAT AA | SEHAT AA | SEHAT AA |

Sumber : PT. Petrokimia Gresik, 2012

Setelah melakukan perhitungan total bobot, dapat diketahui bahwa tingkat kinerja keuangan PT. Petrokimia Gresik pada tahun 2009-2011 mengalami peningkatan dan penurunan. Meskipun terjadi peningkatan dan penurunan, tetapi tidak terlalu signifikan dan kinerja keuangan perusahaan pada tahun tersebut tidak terpengaruhi. Kesimpulan dari penilaian kinerja tersebut adalah sehat, sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 dimana PT. Petrokimia Gresik telah melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan baik.

Ini terbukti dengan diperolehnya nilai yang baik dengan kriteria sehat pada tahun 2009-2011.



## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan dan diajukan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi kemajuan perusahaan dimasa yang akan datang.

#### A. Kesimpulan

1. PT. Petrokimia Gresik telah melaksanakan prinsip umum tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan Pedoman *Good Corporate Governance* Nomor : KEP/31/ M.EKUIIN/08/1999 yang meliputi penerapan. Prinsip umum *Good Corporate Governance* meliputi *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*. Pedoman tersebut memiliki fungsi sebagai standar tata kelola perusahaan yang baik, khususnya pada aspek keuangan. Sejak tahun 2009 hingga 2011, PT. Petrokimia Gresik selalu menyampaikan laporan keuangan kurang dari 4 bulan dan skor yang diperoleh perusahaan selalu maksimal. Transparansi dalam penyampaian laporan keuangan setiap tahun, sejak tahun 2009 hingga 2011 selalu membuat kurang dari 4 bulan dan skor yang dapat diperoleh perusahaan selalu maksimal. Transparansi dalam penyampaian rancangan RKAP kurang dari dua bulan sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan dan perolehan skor yang didapat selalu maksimal. Transparansi dalam penyampaian laporan periodik perusahaan selalu menyampaikan laporan periodik kurang dari 30 hari setelah berakhirnya periode laporan, sehingga skor penilaian selalu maksimal. Perusahaan telah

dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. *Corporate Social Responsibility* merupakan wujud dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada lingkungan sekitarnya. Perusahaan telah dikelola secara independen, sehingga setiap organ tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Perusahaan telah memberikan perlakuan yang setara dan wajar atau *Fairness* kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan

2. PT. Petrokimia Gresik telah mengembangkan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*, bukan hanya pada aspek keuangan saja, tetapi mengembangkan prinsip-prinsip umum tata kelola perusahaan yang baik. Penulis juga menemukan bahwa dalam tiga tahun terakhir yakni 2009, 2010, dan 2011 penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada kinerja aspek keuangan memiliki nilai sehat AA. Penilaian tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002. PT. Petrokimia Gresik selalu berusaha keras untuk menerapkan *Good Corporate Governance* sesuai dengan pedoman dan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi PT. Petrokimia Gresik selalu menghadapi berbagai kendala dan hambatan dalam perjalanannya. Kendala tersebut muncul dari beberapa segi, khususnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Seperti pada organ manajemen perusahaan maupun pada aplikasi penerapan prinsip tata kelola perusahaan. Tetapi perusahaan terus berusaha untuk memperbaiki agar nilai perusahaan pada penerapan tata kelola perusahaan selalu meningkat setiap tahunnya.

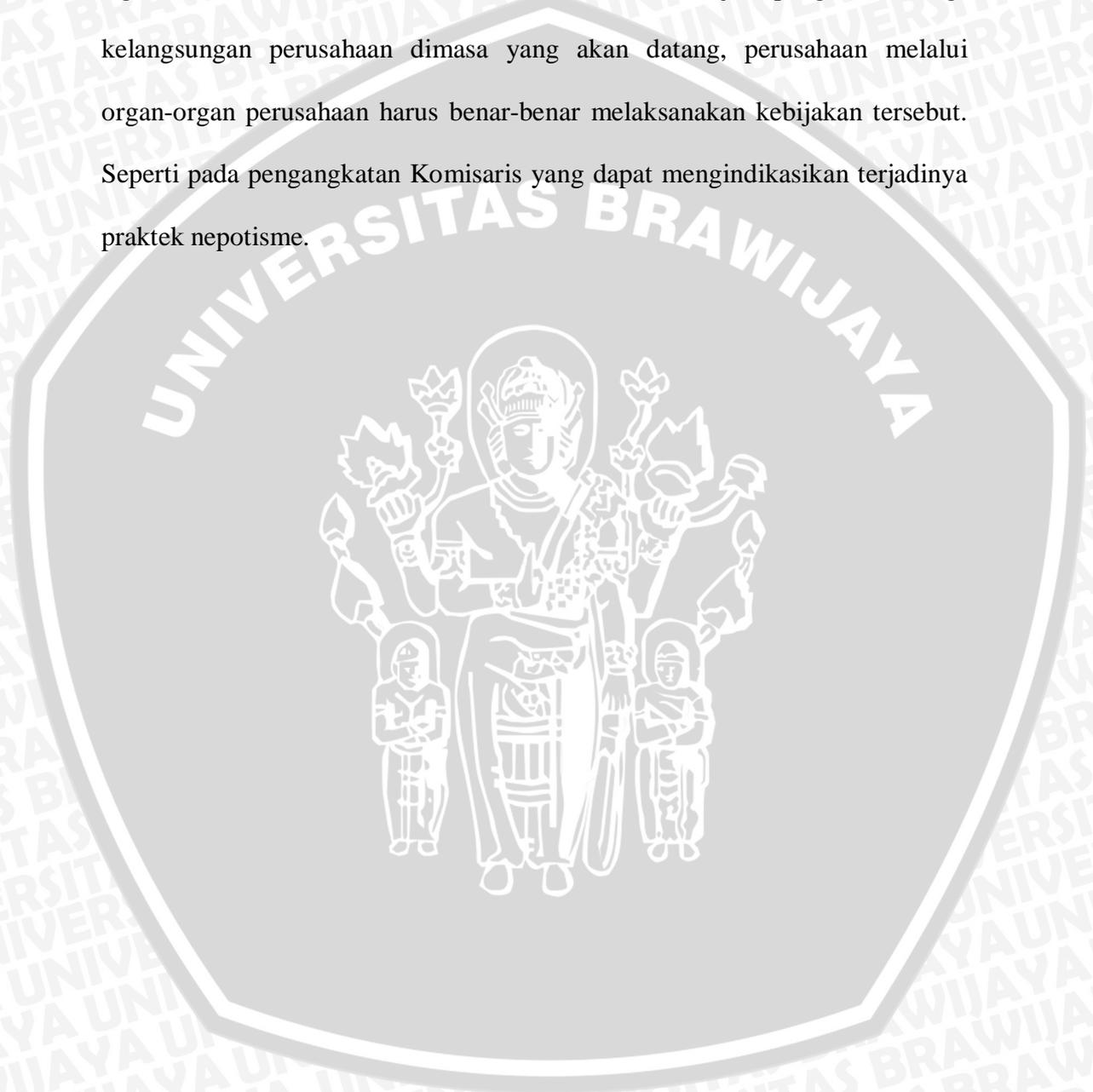
Hasil dari penelitian tersebut akan berpengaruh pada kebijakan perusahaan dimasa yang akan datang guna kebaikan perusahaan dan manajemen.

## B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian dan menyimpulkan beberapa hasil pembahasan penelitian, selanjutnya memberikan saran-saran yang membangun guna kebaikan perusahaan dimasa yang akan datang serta mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Karyawan PT. Petrokimia Gresik belum seluruhnya faham dan mengerti apa arti tata kelola perusahaan yang baik. Agar perusahaan dapat memperoleh penilaian yang baik dalam penerapan *Good Corporate Governance*, manajemen sebaiknya lebih melakukan sosialisasi dan mengkomunikasikan tentang tata kelola perusahaan yang baik pada setiap unit kerja. Seperti pemberian buku saku penerapan *Good Corporate Governance* pada setiap karyawan atau pemasangan slogan tentang prinsip *Good Corporate Governance* pada setiap dinding unit kerja. PT. Petrokimia Gresik sebaiknya lebih terbuka tentang kondisi keuangan perusahaan kepada publik, tetapi tetap menjaga norma dan kerahasiaan perusahaan. PT. Petrokimia Gresik harus berhati-hati dalam menampilkan hasil kinerja keuangan perusahaan pada publik, khususnya dalam *website* perusahaan. Disamping itu perusahaan selalu memperoleh penilaian baik, khususnya pada aspek keuangannya. Agar publik tidak mencurigai terjadinya *mark up* nilai keuangan perusahaan. Karena nilai baik yang diperoleh tanpa transparansi menjadikan pertanyaan besar oleh publik.

2. Setiap kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan tidak selalu dapat dilaksanakan secara sempurna, pasti selalu menghadapi berbagai kendala. Agar kendala tersebut tidak bertambah rumit dan menjadi penghambat bagi kelangsungan perusahaan dimasa yang akan datang, perusahaan melalui organ-organ perusahaan harus benar-benar melaksanakan kebijakan tersebut. Seperti pada pengangkatan Komisaris yang dapat mengindikasikan terjadinya praktek nepotisme.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alexandri, Moh Benny. 2008. *Manajemen Keuangan Bisnis : Teori dan Soal*. Bandung: Alfabeta.
- Brealy, Richard A, Stewart C. Myers, dan Alan J. Marcus. 2007. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Cooper, Donald R. 1996. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Davies, Adrian. 2006. *Best Practice in Corporate Governance : Building Reputation and Sustainable Success*. Burlington: Gower Publishing Company.
- Djanegara, Moermahadi Soerja. 2008. *Menuju Good Corporate Governance : Suatu Kajian Empiris*. Bogor: Kesatuan Press.
- Effendi, Muh. Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gitosudarmo, Indriyo dan Basri. 2002. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta :BPFE-Yogyakarta.
- Horne, James C. Van. 1997. *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002 Tanggal 4 Juni 2002 Tentang Penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara(BUMN).
- Kuswadi. 2006. *Memahami Rasio-Rasio Keuangan Bagi Orang Awam*. Jakarta: Gramedia.
- Moeljono, Djokosantoso. 2005. *Good Corporate Culture Sebagai Inti Good Corporate Governance*. Jakarta: Gramedia.
- Pieris, John dan Nizam Jim Wiryawan. 2007. *Etika Bisnis dan Good Corporate Governance*. Jakarta: Pelangi Cendekia.
- Sekaran, Uma. 2007. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.

- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sundjaja, Ridwan S & Inge Barlian. 2003. *Manajemen Keuangan Satu*. Klaten: Intan Sejati.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. 2008. *Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan hak-hak istimewa demi kelangsungan usaha*. Jakarta: Kencana.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno. 2007. *Manajemen Keuangan Teori, konsep dan aplikasi* Yogyakarta: EKONISIA
- Syakhroza, Akhmad. 2005. *Corporate Governance: Sejarah dan perkembangan, teori, model dan sistem governance serta aplikasinya pada perusahaan BUMN*. Jakarta: Penerbit FEUI.
- Syamsuddin, Lukman. 2009. *Manajemen Keuangan Perusahaan : Konsep Aplikasi dalam : Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wibisono, Dermawan. 2011. *Manajemen Kinerja Korporasi dan Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Wirartha, I Made. 2006. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 TAHUN 2003 “Tentang Badan Usaha Milik Negara”.
- Zarkasyi, Moh. Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance : Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.